

**PERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA DALAM MENDUKUNG CAPAIAN INDEKS
DESA MEMBANGUN DESA BINUSAN KABUPATEN
NUNUKAN**

SKRIPSI

Sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi



Oleh:

**NURUL SAFARIA DAHLAN
1901036172
AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2023**

**PERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA DALAM Mendukung Capaian Indeks
DESA Membangun Desa Binusan Kabupaten
NUNUKAN**

SKRIPSI

Sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi



Oleh:

**NURUL SAFARIA DAHLAN
1901036172
AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Mendukung Capaian Indeks Desa Membangun Desa Binusan Kabupaten Nunukan

Nama Mahasiswa : Nurul Safaria Dahlan

NIM : 1901036172

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : S1-Akuntansi

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Menyetujui,

Samarinda, 18 Desember 2023
Dosen Pembimbing



Dr. Wulan Iyhyg Ratna Sari, S.E., M.Si., CSP., CMA., CPS., CIBA
NIP. 19770328 200312 2 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mulawarman



Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si
NIP. 19620513 198811 2 001

Lulus Tanggal Ujian : 13 Desember 2023

SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DINYATAKAN LULUS

Judul Skripsi : Peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Mendukung Capaian Indeks Desa Membangun Desa Binusan Kabupaten Nunukan

Nama : Nurul Safaria Dahlan

NIM : 1901036172

Hari : Rabu

Tanggal Ujian : 13 Desember 2023

TIM PENGUJI

1. Dr. Wulan Iyhyig Ratna Sari, S.E., M.Si., CSP., CMA., CPS., CIBA
NIP. 19770328 200312 2 001



2. Anisa Abubakar Lahji, S.E., M. Si., Ph. D
NIP. 19780630 200212 2 002



3. Yoremia Lestari br. Ginting, S. E., M. Ak., CSRS., CSRA
NIP. 19850221 201404 2 001



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa di dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur penjiplakan, saya bersedia Skripsi dan Gelar Sarjana atas nama saya dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 03 November 2023



Nurul Safaria Dahlan

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Safaria Dahlan

NIM : 1901036172

Program Studi : S1-Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

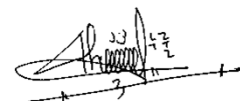
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, dengan ini menyetujui untuk memberikan izin kepada **UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman**. Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul **“Peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Mendukung Capaian Indeks Desa Membangun Desa Binusan Kabupaten Nunukan”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini kepada UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman berhak menyimpan, mengalih media atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Samarinda

Tanggal: 18 Desember 2023

Yang Menyatakan,



Nurul Safaria Dahlan

NIM. 1901036172

RIWAYAT HIDUP



Nurul Safaria Dahlan, lahir di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 20 Mei 2000. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Dahlan dan Ibu Salmia. Penulis merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Pada tahun 2007 penulis memulai pendidikan pertama di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 004 Nunukan, lalu pada tahun 2009 penulis pindah Sekolah di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 003 Nunukan Selatan hingga lulus pada tahun 2013. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Nunukan hingga lulus pada tahun 2016. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Nunukan hingga lulus pada tahun 2019.

Pada tahun 2019, penulis diterima menjadi mahasiswa Strata 1 (S1) Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman. Kemudian pada tahun 2022, penulis melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Muara Langon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, 18 Desember 2023

Nurul Safaria Dahlan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan limpahan rahmat serta hidayah juga pertolongan yang telah diberikan kepada hamba-Nya. Sholawat dan salam tidak lupa penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang menjadi panutan seluruh umatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Mendukung Capaian Indeks Desa Membangun Desa Binusan Kabupaten Nunukan”**.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya apabila terdapat kesalahan yang dilakukan. Terdapat pula kendala dan kesulitan yang dihadapi penulis, namun berkat bantuan dan dukungan serta arahan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan sebaik mungkin. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si. selaku Rektor Universitas Mulawarman.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
3. Ibu Dwi Risma Deviyanti, S.E., M.Si., Ak., CA., CMA., CSRS. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

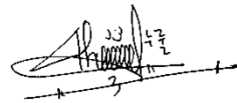
4. Bapak Dr. H. Zaki Fakhroni, Ak., CA., CMA., CTA., CFrA., CIQaR. selaku Koordinator Program Studi S1-Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
5. Ibu Dr. Wulan Iyhg Ratna Sari, SE., M.Si., CMA., CSP. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, penulis mengucapkan terima kasih banyak telah memberikan bimbingan, waktu, ilmu, serta nasihat kepada penulis selama penyusunan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan sangat baik.
6. Bapak Rusliansyah, SE, M.Si. selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan serta nasihat selama menempuh studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
8. Kedua orang tua tersayang dan tercinta yaitu Bapak Dahlan dan Ibu Salmia, serta semua keluarga yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, doa, nasihat dan kesabaran yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis. Penulis berharap dapat menjadi anak yang membanggakan dan bermanfaat.
9. Adik-adik kesayangan penulis yaitu Muhammad Jumadil Alamsyah, Muhammad Safar Alamsyah, Assyifa Ramadania Dahlan dan Tsabitah Ariana Syawalia Dahlan terima kasih banyak selalu menemani penulis dan memberikan dukungan, doa, bantuan, serta semangat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Kepada Arya Putra Alan Setio, terima kasih banyak telah kebersamain penulis memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
11. Teman-teman terdekat sekaligus teman seperjuangan penulis yaitu Hilda Salsabila, Khairunnisa, Aulia Rahmi Azizah, Khusna Kurota'ayun, Reza Checzen Maretha, Fitri Aulia Rahmadani, Ardhelia Irnadianis Ifada, Yasmin Putri Mardani, Doratul Hikmah dan Nur Alissa Ariani terima kasih telah memberikan banyak dukungan, semangat, doa, serta bantuan untuk penulis hingga saat ini agar penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan sangat baik. Penulis berharap untuk teman-teman yang masih berjuang dapat menyelesaikan semuanya dengan baik dan teman-teman yang telah lulus bisa sukses.
12. Teman-teman kost Melly yang selalu kebersamai penulis yaitu kak Delfi, Pink, Enjel, Yenyen, Salda, Marni, Putri, Rahma, Nuur, Pute dan Dea terima kasih telah memberikan banyak dukungan, semangat, doa, serta bantuan untuk penulis hingga saat ini agar penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan sangat baik. Penulis berharap untuk teman-teman yang masih berjuang dapat menyelesaikan semuanya dengan baik dan teman-teman yang telah lulus bisa sukses.
13. Kepada Kepala Desa Binusan, Sekretaris Desa Binusan beserta Aparat Pemerintahan Desa Binusan, penulis mengucapkan terima kasih banyak telah membantu dalam penyusunan skripsi dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kinerja pembangunan berkelanjutan di Desa Binusan ke depan.

14. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah tulus dan ikhlas membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Demikian kata pengantar dari penulis, semoga semua bentuk dukungan yang telah diberikan kepada penulis, mendapatkan balasan kebaikan pula dari Allah SWT, serta skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi yang berkepentingan.

Samarinda, 17 Oktober 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nurul Safaria Dahlan', written over a horizontal line.

Nurul Safaria Dahlan

ABSTRAK

Nurul Safaria Dahlan, 2023. Peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Mendukung Capaian Indeks Desa Membangun Desa Binusan, Kabupaten Nunukan. Skripsi ini di bawah bimbingan ibu Wulan Iyhg Ratna Sari. Peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) pada Indeks Pembangunan Desa (IDM) masih belum spesifik. Hal ini disebabkan oleh perbedaan anggaran yang dikeluarkan untuk program dan kegiatan di pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran APB Desa dalam mendukung pencapaian indeks pembangunan desa di Desa Binusan. Desa Binusan merupakan desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan lingkungan yang sangat mendukung dalam mencapai indeks desa pembangunan sebagai desa mandiri. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah perangkat pemerintah desa yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa dan program pembangunan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Binusan telah mencapai sebagian besar program pembangunan prioritas dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Namun, masih ada program prioritas yang belum dapat dipenuhi karena keterbatasan anggaran desa. Capaian Indeks Ketahanan Sosial memiliki skor nilai pada tahun 2020 sebesar 41.5%, 2021 sebesar 39.1% dan 2022 sebesar 39.2%. capaian Indeks Ketahanan Ekonomi pada tahun 2020 sebesar 34.2%, 2021 sebesar 32.2% dan 2022 sebesar 32.2%. Capaian Indeks Ketahanan Lingkungan pada tahun 2020 sebesar 24.3%, 2021 sebesar 28.7% dan 2022 sebesar 28.6%. Selain itu, beberapa program prioritas dan sangat prioritas tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Desa Binusan karena program-program tersebut merupakan kewenangan instansi lain, misalnya ketersediaan sarana transportasi umum yang menjadi kewenangan Instansi Pelayanan Perhubungan. Singkatnya, peran APB Desa dalam mencapai pembangunan berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh besarnya alokasi anggaran untuk program super prioritas dan prioritas secara terintegrasi dengan instansi lain.

Kata kunci: Peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Indikator Sosial, Indikator Ekonomi, Indikator Lingkungan, Indeks Pembangunan Desa, Pemerintah Desa Binusan

ABSTRACT

Nurul Safaria Dahlan, 2023. The Role of Village Revenue and Expenditure Budget in Supporting Village Index Achievement Building Binusan Village, Nunukan Regency. This thesis is under the guidance of Wulan Iyhig Ratna Sari. The role of the Village Budget (APB Desa) in the Village Development Index (IDM) is still not specific. This is due to differences in budgets spent on programs and activities in village government. This study aims to determine the role of Village APB in supporting the achievement of village development index in Binusan Village. Binusan Village is a village that has the potential of social, economic, and environmental resources that are very supportive in achieving the development village index as an independent village. The type of research used is a qualitative approach with a descriptive method. The data collection methods used were semi-structured interviews and documentation. The subject of the study is village government apparatus involved in village financial management and village development programs. The results showed that the Binusan Village government has achieved most of the priority development programs in social, economic, and environmental aspects. However, there are still priority programs that cannot be fulfilled due to limited village budgets. The achievement of the Social Resilience Index has a value score in 2020 of 41.5%, 2021 of 39.1% and 2022 of 39.2%. The achievement of the Economic Resilience Index in 2020 was 34.2%, 2021 was 32.2% and 2022 was 32.2%. The achievement of the Environmental Resilience Index in 2020 was 24.3%, 2021 was 28.7% and 2022 was 28.6%. In addition, some priority and very priority programs cannot be completed by the Binusan Village Government because these programs are the authority of other agencies, for example the availability of public transportation facilities under the authority of the Transportation Service Agency. In short, the role of Village APB in achieving sustainable development is strongly influenced by the large budget allocation for super priority and priority programs in an integrated manner with other agencies

Keywords: *Role of Village Budget, Social Indicators, Economic Indicators, Environmental Indicators, Village Development Index, Binusan Village Government*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Fokus Penelitian.....	8
1.4. Tujuan Penelitian	8
1.5. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Desa.....	9
2.2 Pemerintahan Desa.....	9
2.3 Pembangunan Desa	10
2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	12
2.5 Kinerja APBDes.....	20
2.6 Indeks Desa Membangun (IDM)	21

2.7	Penelitian Terdahulu.....	29
2.8	Kerangka Pikir	31
BAB III METODE PENELITIAN		33
3.1	Jenis Penelitian.....	33
3.2	Definisi Operasional	33
3.3	Lokasi Penelitian.....	34
3.4	Sumber Data.....	34
3.5	Metode Pengumpulan Data	35
3.5.1	Wawancara	35
3.5.2	Dokumentasi	39
3.6	Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		43
4.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	43
4.2	Hasil Penelitian	48
4.2.1	Peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....	49
4.3.	<i>Coding</i> dan Tema	68
4.4.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Indeks Desa Membangun (IDM) di Desa Binusan.....	70
4.4.1.	Capaian Prioritas pada Aspek Sosial.....	80
4.4.2.	Capaian Prioritas pada Aspek Ekonomi	86
4.4.3.	Capaian Prioritas pada Aspek Lingkungan	89
4.5.	Pembahasan.....	106
BAB V PENUTUP.....		110
5.1	Kesimpulan	110
5.2	Saran	112
DAFTAR PUSTAKA		113
LAMPIRAN.....		115

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Persentase Indeks Komposit Desa Binusan.....	6
Tabel 1.2 Rekomendasi IDM	6
Tabel 1.3 Jumlah APBDes dan Nilai IDM di Desa Binusan.....	7
Tabel 2.1 Klasifikasi Desa Berdasarkan IDM.....	23
Tabel 2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	29
Tabel 4.1 Nilai Besaran Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa	50
Tabel 4.2 Daftar Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa).....	52
Tabel 4.3 Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) 2020	55
Tabel 4.4 Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) 2021	59
Tabel 4.5 Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) 2022	63
Tabel 4.6 <i>Coding</i> dan Tema	68
Tabel 4.7 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes 2020.....	72
Tabel 4.8 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes 2021.....	74
Tabel 4.9 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes 2022.....	75
Tabel 4.10 APB Desa dalam Capaian IDM (Rekomendasi IDM yang belum terlaksana).91	91

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	32
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Binusan	44

DAFTAR SINGKATAN

APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBDes	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
RPJM Des	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
RKP Des	Rencana Kerja Pemerintah Desa
PADes	Pendapatan Asli Desa
ADD	Alokasi Dana Desa
DD	Dana Desa
IDM	Indeks Desa Membangun
BPD	Badan Permusyawaratan Desa
IKS	Indeks Ketahanan Sosial
IKE	Indeks Ketahanan Ekonomi
IKL	Indeks Ketahanan Lingkungan
PKPKD	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
SDM	Sumber Daya Manusia
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BUMDES	Badan Usaha Milik Desa
PTPKD	Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan
SDA	Sumber Daya Alam
KAUR	Kepala Urusan
KASI	Kepala Seksi
BPR	Badan Perkreditan Rakyat

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara.....	115
Lampiran 2. Kantor Desa Binusan.....	116
Lampiran 3. Wawancara dengan Kepala Desa.....	117
Lampiran 4. Wawancara dengan Sekertaris Desa.....	117
Lampiran 5. Surat Penelitian.....	118
Lampiran 6. Balasan Surat Penelitian.....	119
Lampiran 7. Indeks Desa Membangun 2021.....	120
Lampiran 8. Indeks Desa Membangun 2022.....	121
Lampiran 9. Indeks Desa Membangun 2022.....	122
Lampiran 10. Laporan APB Desa 2020.....	123
Lampiran 11. Laporan APB Desa 2021.....	124
Lampiran 12. Laporan APB Desa 2022.....	125
Lampiran 13. Lembar Koreksi Seminar.....	129
Lempiran 14. Plagiasi Turnitin.....	132

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peyelenggaraan dan kepentingan masyarakat dilaksanakan oleh pemerintahan desa dalam sistem kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jalannya Pemerintahan desa dikelola dan dilaksanakan oleh pemerintah desa dan perangkat desa. Perangkat-perangkat desa yang ada diangkat oleh kepala desa dan memiliki tugas dalam membantu jalannya pemerintahan desa. Salah satu tugas bagi kepala desa dan perangkat desa yaitu bagaimana membangun dan menciptakan mekanisme pemerintahan yang berkeadilan untuk mensejahterakan masyarakat. Agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat tersebut pemerintah harus melakukan sesuai dengan peraturan yang ada demi mencapai tujuan yang diinginkan.

Tugas pokok dari pemerintah desa dibagi dalam 4 (empat) kegiatan yang tertuang pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat yang dibiayai dari APBDesa. Ketika melaksanakan tugasnya, pemerintah desa dalam hal ini kepala desa Bersama dengan perangkatnya melaksanakan pengelolaan keuangan desa harus senantiasa berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa dibantu oleh perangkat desa

menyelenggarakan penyusunan RPJMDes dengan mengikutsertakan unsur masyarakat desa dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas program serta kegiatan pemerintah daerah kabupaten. Mengacu pada RPJMDes, kemudian pemerintah desa menetapkan RKPDes yang berisi Rencana Kerja Pemerintah Desa yang akan dilaksanakan selama 1 tahun.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang di dalamnya menjelaskan bahwa penerimaan desa dapat bersumber dari Alokasi Dana Desa. selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN menegaskan dua sumber penerimaan keuangan desa yaitu Alokasi Dana Desa dan Dana Desa. Kemudian, melalui Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang diubah dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kedua sumber penerimaan tersebut dikelola dan dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam rangka membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kegiatan yang dimaksud diprioritaskan pada dua hal pokok yaitu pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat desa. Kegiatan pembangunan

yang dilaksanakan berdasarkan prioritas penggunaan dari masing-masing anggaran. Prioritas tersebut didasarkan pada regulasi atau peraturan yang mengatur secara umum tentang penggunaan anggaran dan diharuskan kepada pemerintah daerah untuk membuat regulasi yang mengatur tentang penegasan atau teknis dari pelaksanaannya (Sulaiman, 2018)

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan Mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan pada aspek sosial, ekonomi dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari pemerintah sesuai dengan partisipasi masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Indeks Desa Membangun atau disebut IDM, dikembangkan dalam memperkuat upaya pencapaian sasaran desa dan Kawasan Perdesaan. Sasaran pembangunan desa memerlukan kejelasan desa dan status perkembangannya. Indeks Desa Membangun tidak hanya berguna dalam mengetahui status perkembangan setiap desa, letak dengan karakteristiknya, akan tetapi juga dapat dikembangkan sebagai instrument untuk melakukan targetting dalam pencapaian target RPJM dan koordinasi K/L dalam pembangunan Desa (Hamidi, 2015).

Desa Binusan adalah desa di kecamatan Nunukan, Nunukan, Kalimantan Utara, Indonesia. Desa ini memiliki luas wilayah 95,540 Km² dengan jumlah penduduk 5.272 jiwa. Desa Binusan terbagi ke dalam dua wilayah utama yaitu Binusan Pusat dan Binusan Dalam. Desa Binusan merupakan satu-satunya desa yang berada di pulau Nunukan. Desa Binusan memiliki wilayah yang sangat luas, sehingga Setengah dari pulau Nunukan adalah Desa Binusan. Desa Binusan direncanakan juga akan mengalami pemekaran wilayah kembali yang akan memisahkan antara Binusan Pusat, Binusan Dalam, dan Sei. Fatimah.

Lokasi Desa Binusan yang berada di tepi laut (wilayah pantai) menjadikan tempat ini sebagai salah satu produsen rumput laut khususnya rumput laut merah dan minyak sawit. Mata pencaharian penduduk desa ini pun didominasi oleh petani rumput laut dan sawit. Luasnya perkebunan sawit menjadikan desa Binusan sebagai target binsis perusahaan produsen minyak sawit. Sementara itu, komoditas rumput laut diperdagangkan dalam bentuk bahan mentah saja.

Selain dikenal sebagai daerah penghasil komoditas pertanian yang besar, desa Binusan juga dikenal sebagai salah satu tempat dengan lokasi wisata yang menarik. Destinasi wisata utama dan yang diunggulkan dari desa ini adalah air terjunnya. Lokasi wisata lain yang menarik wisatawan berkunjung ke desa ini adalah Baloy Adat Tidung yang merupakan bangunan sakral adat masyarakat Tidung yang berfungsi utama sebagai titik dilakukannya prosesi upacara adat.

Desa Binusan diketahui anggaran pendapatan dan belanja desa yang terdiri dari dua sumber pendapatan yaitu ada Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diperuntukan untuk pembangunan seperti pada kesehatan, Pendidikan dan sosial digunakan juga untuk dana tidak terduga dan insentif untuk kader posyandu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan lain sebagainya. Dan terdapat juga Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD kabupaten yang dipergunakan untuk insentif perangkat desa seperti RT dan BPD, dan biaya operasional desa dan BPD.

Desa Binusan diketahui dari hasil rekomendasi Indeks Desa membangun, bahwa status IDM dari Desa Binusan adalah Maju dengan nilai IDM yang terus meningkat dari tahun 2020 sampai dengan 2022. Pada tahun 2020 senilai 0.7306, pada tahun 2021 senilai 0.7751 dan pada tahun 2022 senilai 0.7770 (Lembaran Negara, 2022).

Persentase rekomendasi IDM di Desa Binusan pada indeks komposit dalam kurun waktu tiga tahun terus mengalami perubahan di setiap tahunnya, yaitu:

Tabel 1.1 Persentase Indeks Komposit Desa Binusan

IKS			IKE			IKL		
2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
41.5%	39.1%	39.2%	34.2%	32.2%	32.2%	24.3%	28.7%	28.6%

Sumber: Hasil Rekomendasi IDM

Pada Desa Binusan terdapat beberapa indikator peritem yang menjadi rekomendasi dari Kemendesdesa pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, yaitu:

Tabel 1.2 Rekomendasi IDM

INDEKS KOMPOSIT	INDIKATOR PERITEM	REKOMENDASI	
		Super Prioritas	Prioritas
		0,00 - 0,40	0,41 - 0,60
SOSIAL (IKS)	Akses Pendidikan SMA/SMK/MA < 6 KM	✓	
	Kegiatan PKBM/Paket A-B-C	✓	
	Kegiatan Kursus	✓	
EKONOMI (IKE)	Terdapat Kantor Pos dan Jasa Logistik		✓
	Tersedianya Lembaga Perbankan Umum dan BPR		✓
	Akses Penduduk ke Kredit	✓	
	Tersedianya Lembaga Ekonomi Rakyat (Koperasi)/Bumdes		✓
	Terdapat Usaha Kedai makanan, Restoran, Hotel dan Penginapan		✓
	Terdapat Moda (Angkutan Umum, Trayek Reguler dan Jam Operasi)		✓
	Jalan yang Dapat Dilalui oleh Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih		✓
LINGKUNGAN (IKL)	Upaya/Tindakan terhadap Potensi Bencana Alam	✓	

Sumber: Hasil Rekomendasi IDM

Pada tiga tahun terakhir tahun 2020-2022 Desa Binusan memperoleh anggaran dari pusat setiap tahunnya digunakan dalam proses pembangunan desa. Adapun jumlah Anggaran dan Nilai Indeks Desa Membangun adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Jumlah APBDes dan Nilai IDM di Desa Binusan

Tahun	APBDes	IDM
2020	3.709.580.946,00	0.7306
2021	4.272.593.516,00	0.7751
2022	2.454.091.612,00	0.7770

Sumber: Laporan Realisasi APBDes Desa Binusan dan Hasil Rekomendasi IDM

Fenomena yang terdapat pada desa Binusan Kabupaten Nunukan yaitu dalam mencapai Indeks Desa Membangun terdapat Jumlah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang menjadi suatu keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan desa. Sehingga dalam hal ini, perlu diketahui berapa jumlah APBDes yang tersalurkan dalam setiap indikator yang terdapat pada Indeks Desa Membangun.

Dengan adanya Indeks Desa Membangun dapat diketahui seberapa maju perkembangan pembangunan desa di Desa Binusan. Dari penjelasan di atas dapat dilihat permasalahan yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian bagi peneliti untuk mengetahui Bagaimana Peran Anggaran Dan Belanja Desa Dalam Mendukung Capaian Indeks Desa Membangun Desa Binusan Kabupaten Nunukan.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana Peran Anggaran dan Belanja Desa dalam Mendukung Capaian Indeks Desa Membangun Desa Binusan?

1.3. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan untuk menggali informasi, memahami, dan untuk menganalisis pendapat informan terkait dengan Peran Anggaran dan Belanja Desa dalam Mendukung Capaian Indeks Desa Membangun Desa Binusan

1.4. Tujuan Penelitian

Bertujuan untuk mengetahui Peran Anggaran dan Belanja Desa dalam Mendukung Capaian Indeks Desa Membangun Desa Binusan

1.5. Manfaat Penelitian

Dengan melalui penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi terkait dengan Peran Anggaran Dan Belanja Desa Dalam Mendukung Capaian Indeks Desa Membangun Desa Binusan Kabupaten Nunukan untuk pemerintah Desa maupun pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. Adapun manfaat dari penelitian antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan mengenai Peran Anggaran Dan Belanja Desa Dalam Mendukung Capaian Indeks Desa Membangun Desa Binusan Kabupaten Nunukan. Penelitian ini juga bermanfaat bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian lanjutan terkait APBDes dan IDM desa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi guna kemajuan bagi desa dalam mendukung capaian Indeks Desa Membangun.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang konsep-konsep yang mendasari penelitian ini, diantaranya peraturan desa, pemerintahan desa, pembangunan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa dan indeks desa membangun.

2.1 Desa

Menurut undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan NKRI (Orangbio, 2017).

Menurut Koenjaranigrat (1984) desa adalah suatu perkumpulan yang kecil dan menetap tetap disuatu daerah. Sedangkan menurut Sastramihardja (1999) desa merupakan organisasi sosial yang melakukan fungsi internal yaitu menjurus pada kombinasi keanggotaannya, sehingga keseluruhannya menjadi suatu organisasi yang bulat (Setyowati, 2019).

2.2 Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018). Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa atau PKPKD adalah kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan

keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa atau PPKD adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai Sebagian kekuasaan PPKD.

Badan Permusyawaratan Desa atau BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretaris Desa yang menjalankan tugas sebagai coordinator PPKD. Kepala urusan atau Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretaris Desa yang menjalankan tugas PPKD. Kepala Seksi atau Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.

2.3 Pembangunan Desa

Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia (Lembaran Negara, 2019). Pembangunan merupakan suatu tindakan dalam menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, yang paling utama yaitu dari segi akumulasi modal dan kekayaan suatu negara. Oleh sebab itu, hasil dari pembangunan harus di bagi secara merata untuk seluruh rakyat secara adil sebagai wujud peningkatan kesejahteraan (Arina, 2021) Tujuan utama pada usaha

pembangunan ekonomi yaitu upaya menciptakan pertumbuhan yang tinggi, pertumbuhan harus dipergunakan dalam menghapus dan mengurangi tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan atau usaha dalam menciptakan kesempatan kerja bagi penduduk, sebab dengan adanya kesempatan kerja bagi penduduk atau masyarakat maka akan memperoleh pendapatan dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Pembangunan desa merupakan meningkatkan pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan, pengembangan ekonomi pertanian berstandar produktif, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, dan meningkatkan kualitas keteraturan dan kenyamanan masyarakat (Hermansyah, 2022). Pembangunan pedesaan sudah menjadi keharusan mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat seperti halnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan mengubah perilaku masyarakat untuk meraih kehidupan yang lebih berkualitas (Purnawati, 2020).

Tujuan pembangunan desa adalah memberikan tingkatan dalam hal kesejahteraan hidup bagi manusia dan pemberantasan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur desa, pengembangan kualitas ekonomi lokal dan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa dilakukan dengan dasar semangat kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong guna mewujudkan perdamaian serta keadilan sosial.

2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Rencanan keuangan tahunan pemerintah desa yang disetujui dan dibicarakan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan disusun sesuai dengan peraturan daerah. Sedangkan menurut Sumpeno (2011:213) APBDes adalah salah satu rencana keuangan tahunan desa yang mendukung prediksi sumber pendapatan dan belanja dalam mendukung kepentingan program pembangunan desa sesuai dengan peraturan desa yang berlaku (Faridah & Suryono, 2015). Menurut Musdzalifah (2016) APBDes merupakan rencana keuangan pemerintah desa, yang didalamnya terdapat susunan pemerintah desa dalam mencapai tujuan membangun dan mengatur desanya (Orangbio, 2017).

Dengan adanya APBDes setiap penyelenggaraan pemerintahan desa mampu dalam suatu rencana pengelolaan keuangan desa yang teratur sesuai dengan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran desa dapat diperuntukan secara merata sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tata Kelola yang baik (*good governance*). Oleh sebab itu APBDes diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat desa melalui perencanaan pembangunan yang ada serta dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Salah satu yang merupakan sumber pendapatn desa adalah dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang sudah dianggarkan setiap tahunnya sebesar 10% yang di ambil dari APBD. Dalam APBD setiap tahunnya sebesar 10% untuk ADD direalisasikan untuk meningkatkan kesejahteraan, pemberdayaan, dan pemerataan pembangunan dipedesaan melalui APBD kabupaten, provinsi, dan pemerintah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari:

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa dalam satu tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018)

Pendapatan Desa yang dikelompokkan terdiri atas:

a. Pendapatan asli Desa;

Kelompok pendapatan asli Desa, terdiri atas :

a) Hasil usaha

Hasil usaha Desa antara lain bagi hasil BUM Desa

b) Hasil aset

Hasil aset antara lain tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

c) Swadaya, partisipasi dan gotong royong

Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.

d) Pendapatan asli Desa lain

Pendapatan asli Desa lain antara lain hasil pungut Desa.

b. Transfer

Kelompok transfer, terdiri atas jenis:

a) Dana Desa;

- b) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
 - c) Alokasi dana desa;
 - d) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan
 - e) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Pendapatan lain
- Kelompok pendapatan lain, terdiri atas:
- a) Penerimaan dari hasil kerja sama Desa
 - b) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
 - c) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
 - d) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - e) Bunga bank; dan
 - f) Pendapatan lain Desa yang sah.

2. Belanja Desa

Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diterima Kembali oleh desa. Belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018)

Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang:

a. Penyelenggaraan pemerintahan Desa

Kalsifikasi belanja pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dibagi dalam sub bidang, yaitu:

- a) Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
- b) Sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
- c) Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistic dan kearsipan;
- d) Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
- e) Pertanahan.

b. Pelaksanaan pembangunan Desa

Kalsifikasi belanja pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dibagi dalam sub bidang, yaitu:

- a) Pendidikan;
- b) Kesehatan;
- c) Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d) Kawasan permukiman;
- e) Kehutanan dan lingkungan hidup;
- f) Perhubungan, komunikasi dan informatika;
- g) Energi dan sumber daya mineral; dan
- h) Pariwisata.

c. Pembinaan kemasyarakatan Desa

Kalsifikasi belanja pada bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dibagi dalam sub bidang, yaitu:

- a) Ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
 - b) Kebudayaan dan keagamaan;
 - c) Kepemudaan dan olah raga; dan
 - d) Kelembagaan masyarakat.
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kalsifikasi belanja pada bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dibagi dalam sub bidang, yaitu:

- a) Kelautan dan perikanan;
 - b) Pertanian dan peternakan;
 - c) Peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - d) Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - e) Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - f) Dukungan penanaman modal; dan
 - g) Pemberdayaan dan perindustrian.
- e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa

Kalsifikasi belanja pada bidang Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa dibagi dalam sub bidang, yaitu:

- a) Penanggulangan bencana;
- b) Keadaan darurat; dan
- c) Keadaan mendesak.

Jenis Belanja Desa yang terdiri atas:

a. Belanja pegawai

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain dan pembayaran sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD. Belanja pegawai dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa. Pembayaran jaminan sosial disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APB Desa.

b. Belanja barang/jasa

Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan.

Belanja barang/jasa yang digunakan antara lain untuk:

- a) Operasional pemerintah Desa;
- b) Pemeliharaan sarana prasarana Desa;
- c) Kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
- d) Operasional BPD;
- e) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga;

Bantuan uang untuk operasional Lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.

- f) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat

Dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.

c. Belanja modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan dan menambah aset. Pengadaan barang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.

d. Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa. Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial. Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat. kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

3. Pembiayaan Desa

pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan pengeluaran yang akan diterima Kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018)

Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok, yaitu:

a. Penerimaan pembiayaan

a) SiLPA tahun sebelumnya

SiLPA paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja dan sisa dana kegiatan yang belemu selesai atau lanjutan.

b) Pencairan dana cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.

c) Hasil Penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan

Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

a) Pembentukan dan cadangan

Pembentukan dana cadang dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadang dapat bersumber dari penyesihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b) Penyertaan modal

Penyertaan modal digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat. penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa. Penyertaan modal berbentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual.

2.5 Kinerja APBDes

Kinerja keuangan desa merupakan tingkat dalam suatu capaian hasil kerja pada bidang keuangan desa yang terdiri atas penerimaan serta belanja desa dengan menggunakan sistem keuangan yang sudah menjadi ketentuan melalui suatu kebijakan perundang-undangan selama satu periode anggaran (Martiasuti dkk, 2021). Pengukuran kinerja yang digunakan berupa rasio keuangan yang berasal dari sistem laporan pertanggungjawaban desa berupa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Analisis kinerja keuangan dilaksanakan dalam menilai kemandirian keuangan daerah untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah, mengukur segala aktivitas pemerintah desa pada saat membelanjakan pendapatan daerah, serta melihat kontribusi dari masing-masing sumber pendapatan untuk perolehan pendapatan daerah. Oleh sebab itu, setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah sangatlah penting dalam memperoleh sumber-sumber keuangan.

Pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk dilakukan dalam menilai akuntabilitas pemerintah Desa untuk pengelolaan keuangan Desa dan

dituangkan dalam laporan keuangan yang memiliki tujuan menyajikan informasi mengenai posisi keuangan pemerintah Desa, realisasi anggaran serta menunjukkan keterbukaan atas sumber daya yang akan dikelola oleh pemerintah Desa.

2.6 Indeks Desa Membangun (IDM)

Indeks Desa Membangun disusun untuk mendukung upaya pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri (Permendesa Nomor 2 Tahun 2016). Pembangunan desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat (UU No.6 Tahun 2014). Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atau Kemendesa No.2 Tahun 2016 dibuat untuk pengukuran pembangunan desa yang dilakukan oleh Kemendesa. Indeks Desa Membangun atau IDM disebut sebagai Pengukuran pembangunan oleh Kemendesa dalam Perpres No. 2 Tahun 2016.

Indeks Desa Membangun dikembangkan atas dasar konsep bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu rencana pembangunan berkelanjutan didukung oleh aspek sosial, ekonomi, dan ekologi (lingkungan) menjaga potensi serta kemampuan desa dalam mensejahterahkan kehidupan Desa dan menjadi kekuatan yang saling mengisi. Kebijakan dan aktivitas, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus mewujudkan pemerataan dan keadilan, didasarkan oleh nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengolah potensi sumber daya alam dengan baik dan berkelanjutan.

IDM berisi mengenai pendataan dan pemetaan hal-hal yang dapat dilakukan oleh desa dalam 5 kategori yaitu sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju dan mandiri berdasarkan ukuran perhitungan tertentu. Pengelompokan status Desa berdasar IDM untuk diarahkan dalam memperkuat usaha memfasilitasi dorongan kemajuan Desa menuju Desa Mandiri yang memiliki kemampuan dalam mengelola Daya dalam ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan.

Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa Berkembang atau Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Desa Maju atau Desa Pra-Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Desa Mandiri atau Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk

peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan (Permendesa Nomor 2 Tahun 2016)

Tabel 2.1 Klasifikasi Desa Berdasarkan IDM

No	STATUS DESA	NILAI BATAS
1.	Sangat Tertinggal	$\leq 0,491$
2.	Tertinggal	$> 0,491$ dan $\leq 0,599$
3.	Berkembang	$> 0,599$ dan $\leq 0,707$
4.	Maju	$> 0,707$ dan $\leq 0,815$
5.	Mandiri	$> 0,815$

Sumber: Indeks Desa Membangun, 2015

Indikator Desa Membangun dapat dilihat sebagai berikut:

1. Dimensi Sosial terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:
 - a. Memiliki solidaritas sosial, yang terdiri dari indikator:
 - 1) Kebiasaan gotong royong desa
 - 2) Keberadaan ruang publik terbuka bagi warga yang tidak membayar
 - 3) Ketersediaan fasilitas atau lapangan olahraga; dan
 - 4) Terdapat kelompok kegiatan olahraga.
 - b. Memiliki toleransi, yang terdiri dari indikator:
 - 1) Warga desa terdiri dari beberapa suku atau etnis
 - 2) Warga desa berkomunikasi sehari-hari menggunakan bahasa yang berbeda; dan
 - 3) Terdapat keragaman agama di Desa.
 - c. Rasa aman penduduk, yang terdiri dari indikator:
 - 1) Warga Desa membangun pemeliharaan poskamling lingkungan
 - 2) Partisipasi warga mengadakan siskamling

- 3) Tingkat kriminalitas yang terjadi di Desa
 - 4) Tingkat konflik yang terjadi di Desa; dan
 - 5) Upaya penyelesaian konflik yang terjadi di Desa.
- d. Kesejahteraan sosial, yang terdiri dari indikator:
- 1) Terdapat akses ke Sekolah Luar Biasa
 - 2) Terdapat penyandang kesejahteraan sosial (anak jalanan, pekerja seks komersial dan pengemis); dan
 - 3) Terdapat penduduk yang bunuh diri.
2. Dimensi Kesehatan yang terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:
- a. Pelayanan Kesehatan, yang terdiri dari indikator:
 - 1) Waktu tempuh ke prasarana Kesehatan kurang dari 30 menit
 - 2) Tersedia tenaga kesehatan bidan
 - 3) Tersedia tenaga kesehatan dokter; dan
 - 4) Tersedia tenaga kesehatan lain.
 - b. Keberdayaan Masyarakat untuk Kesehatan yang terdiri dari indikator:
 - 1) Akses ke poskesdes, polindes, dan posyandu; dan
 - 2) Tingkat aktivitas posyandu.
 - c. Jaminan kesehatan, yang terdiri dari indikator tingkat kepesertaan BPJS.
3. Dimensi Pendidikan yang terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:
- a. Akses ke Pendidikan Dasar dan Menengah, yang terdiri dari indikator:
 - 1) Akses ke Pendidikan dasar SD/MI kurang dari 3 kilometer
 - 2) Akses ke SMP/MTS kurang dari 6 kilometer; dan

- 3) Akses ke SMU/SMK kurang dari 6 kilometer.
- b. Akses ke Pendidikan Non Formal, yang terdiri dari indikator:
 - 1) Kegiatan pemberantasan buta aksara
 - 2) Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini
 - 3) Kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/Paket ABC; dan
 - 4) Akses ke pusat keterampilan/kursus.
- c. Akses ke Pengetahuan, yang terdiri dari indikator taman bacaan masyarakat atau perpustakaan Desa.
4. Dimensi permukiman yang terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:
 - a. Akses ke air bersih dan air minum layak, yang terdiri dari indikator:
 - 1) Mayoritas penduduk Desa memiliki sumber air minum yang layak; dan
 - 2) Akses penduduk Desa memiliki air untuk mandi dan mencuci.
 - b. Akses ke Sanitasi, yang terdiri dari indikator:
 - 1) Mayoritas penduduk Desa memiliki jamban; dan
 - 2) terdapat tempat pembuangan sampah.
 - c. Akses ke Listrik, yang terdiri dari indikator jumlah keluarga yang telah memiliki aliran listrik.
 - d. Akses ke Informasi dan Komunikasi, yang terdiri dari indikator:
 - 1) Penduduk Desa memiliki telepon selular dan sinyal yang kuat
 - 2) Terdapat siaran televisi lokal, nasional dan asing; dan

- 3) Terdapat akses internet.
5. Dimensi Ekonomi yang terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:
- a. Keragaman produksi masyarakat desa, yang terdiri dari indikator terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk.
 - b. Tersedia pusat pelayanan perdagangan, yang terdiri dari indikator:
 - 1) Akses penduduk ke pusat perdagangan (pertokoan, pasar permanen dan semi permanen)
 - 2) Terdapat sector perdagangan di permukiman (warung dan minimarket); dan
 - 3) Terdapat usaha kedai makanan, restoran, hotel dan penginapan.
 - c. Akses distribusi/logistik, yang terdiri dari indikator terdapat kantor pos dan jasa logistik.
 - d. Akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, yang terdiri dari indikator:
 - 1) Tersedianya Bank Perkreditan Rakyat (BPR); dan
 - 2) Akses penduduk ke kredit.
 - e. Lembaga Ekonomi, yang terdiri dari indikator tersedianya Lembaga ekonomi rakyat (koperasi)
 - f. Keterbukaan wilayah, yang terdiri indikator:
 - 1) Terdapat moda transportasi umum (transportasi angkutan umum, trayek regular dan jam operasi angkutan umum)

- 2) Jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih (sepanjang tahun kecuali musim hujan, kecuali saat tertentu); dan
 - 3) Kualitas jalan Desa (jalan terluas di Desa dengan aspal, kerikil dan tanah).
6. Dimensi Ekologi yang terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:
- a. Kualitas lingkungan, yang terdiri dari indikator:
 - 1) Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara; dan
 - 2) Terdapat sungai yang terkena limbah.
 - b. Potensi rawan bencana dan tanggap bencana, yang terdiri dari indikator:
 - 1) Kejadian bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan; dan
 - 2) Upaya atau tindakan terhadap potensi bencana alam (tanggap bencana, jalur evakuasi, peringatan dini dan ketersediaan peralatan penanganan bencana).

Berdasarkan dengan hasil data IDM yang ada dalam memetakan untuk melakukan pembangunan desa yang memiliki jumlah tinggi serta dapat meningkatkan kesejahteraan dengan mengisi kebutuhan dasar masyarakat desa, pembangunan sarana dan prasarana desa, pemanfaatan SDA sesuai dengan UU dan pengembangan potensi desa. Dengan adanya data Indeks Desa Membangun (IDM) dapat dijadikan bahan ketersediaan data dan pengukuran yang dapat digunakan seperti status desa dan yang paling utama dalam pengembangan

intervensi. kebijakan yang dapat menjawab masalah dasar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, pembangunan ekonomi dan dampak berkeadilan dapat dijadikan tujuan akhir dari pembangunan desa sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang terdapat di desa (Setyowati, 2019).

Agar terwujudnya pembangunan desa, pemerintah mengalokasikan dana yang besar secara langsung dan diberikan kepada desa berdasar UU No.6 Tahun 2014. Berdasarkan yang diterima oleh desa terdapat beberapa sumber dana, maka dana desa yang dikelola sendiri oleh desa sebagai penunjang pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan desa masing-masing. Jumlah dana yang diterima juga bermacam-macam, tergantung kepada jumlah penduduk. luas wilayah, tingkat kemiskinan, kondisi geografis wilayah dan keadaan desa sendiri.

Hasil dari dana desa yang pengelolaannya dilakukan sendiri oleh desa mampu dilakukan pembangunan desa sesuai dengan Pasal 123 PP No.20 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa pembangunan Kawasan pedesaan merupakan perpaduan pembangunan antar Desa yang dilaksanakan dalam usaha mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Hasil pembangunan Desa tercermin dalam IDM, sehingga pemutakhiran data IDM menjadi laporan wajib bagi Pemerintah Desa yang disampaikan berjenjang melalui pemerintah di atasnya yang dibantu atau difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional (TPP). Pada tahun 2019 Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2018

tentang Pengelolaan Dana Desa memasukkan klasifikasi Desa berdasarkan IDM menjadi salah satu indikator pengalokasi Dana Desa yaitu berupa alokasi afirmasi yang diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi sebesar 3% dari total Dana Desa yang disalurkan ke setiap Kabupaten /Kota.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Relevansi Terhadap Penelitian ini
1.	Tambunan dkk., 2020	Peranan Dana Desa dalam Pengembangan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara	Hasil penelitian ini menggambarkan bagaimana desa sebelum adanya dana desa dan setelah adanya dana desa, kemudian peranan dana desa terhadap pembangunan indeks desa membangun dalam indeks desa membangun ini banyak indikator dan sub indikator penilainnya, serta melihat factor penghambat desa sulit berkembang.
2.	Fauziah, 2021	Indeks Desa Membangun Desa Kendawangan Kanan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Di Desa Kendawangan Kanan terdapat pembangunan sosial ekonomi. 2. Karakteristik penilai IDM Sebagian besar dengan kondisi cukup memadai yang didukung dengan kepemilikan asset pribadi. 3. Terdapatnya perbedaan penilaian antara persepsi masyarakat dengan kriteria pemerintah. Pada penilaian IDM berdasarkan persepsi masyarakat dan kriteria pemerintah memiliki indikator yang paling tinggi dalam realisasi pembangunan yaitu Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Namun tidak terdapat perbedaan kategori IDM antara penilaian persepsi masyarakat dengan kriteria pemerintah yaitu sama-sama masuk dalam kategori Desa Maju. Desa Kendawangan Kanan masuk dalam kategori Desa Maju yaitu untuk penilaian persepsi masyarakat (0,7901) dan kriteria pemerintah (0,7437) pada tahun 2020. IDM di Desa Kendawangan Kanan semakin membaik dari tahun 2019 ke tahun 2020 dengan status desa tertinggal menjadi

Disambung ke Halaman Berikutnya

No	Nama Peneliti	Judul	Relevansi Terhadap Penelitian ini
			desa maju. 4. Penggunaan Dana Desa pada tahun 2019 dan 2020 telah digunakan pada bidang yaitu Pembangunan Desa, Pembinaan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana.
3.	Anggriany, 2021	Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sudah terjadi pembangunan sosial ekonomi di Desa Kuala Tolak dengan karakteristik masyarakat yang cukup beragama, terdapat beberapa perbedaan penilaian dan kategori IDM antara penilaian masyarakat dengan persepsi masyarakat yang disebabkan oleh berbedanya kriteria indikator penilaian yang digunakan oleh pemerintah dengan perspektif masyarakat, sehingga penilalain pemerintah tersebut dilengkapi oleh penilaian persepsi responden yang telah dilakukan. Alokasi dana desa di Desa Kuala Tolak menurut masyarakat sudah sesuai dengan hasil musyawarah dan sudah menampung aspirasi dari masyarakat di desa tersebut.
4.	Astika dkk., 2021	Evaluasi Pembangunan Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahapan pelaksanaan pembangunan di Desa Penataan tidak sesuai peraturan perundangan. 2. Pembangunan yang dilaksanakan mempengaruhi ketercapaian tujuan pembangunan Desa Penataan. 3. Tata Kelola pemerintahan desa mempengaruhi keberhasilan pembangunan; dan 4. Tidak adanya Pendapatan Asli Desa menyebabkan adanya ketergantungan anggaran pembangunan.
5.	Hajratul dkk., 2021	Analisis Indeks Desa Membangun Desa Jeruju Besar	Hasil penelitian ini, IDM Desa Jeruju Besar sebesar 0.8097 sehingga Desa Jeruju Besar tergolong Desa Maju pada tahun 2020. Dengan demikian, terjadi penurunan status satu tingkat kebawah, dari Desa Mandiri menjadi Desa Maju. Masalah yang ditemukan pada lokasi studi ialah kurang optimalnya pemanfaatan fasilitas yang tersedia, dan masih terbatasnya beberapa pelayanan dasar, serta masih kurangnya fasilitas terkait keluar masuknya barang maupun orang serta kondisi hutan mangrove yang mulai rusak di Desa Jeruju Besar. Sementara potensinya adalah terdapatnya solidaritas sosial serta toleransi di masyarakat, terdapatnya lokasi wisata, terdapatnya Lembaga keuangan sebagai akses permohonan serta tersedianya Lembaga ekonomi berupa BUMDes.

Sumber: Data diolah, 2023

2.8 Kerangka Pikir

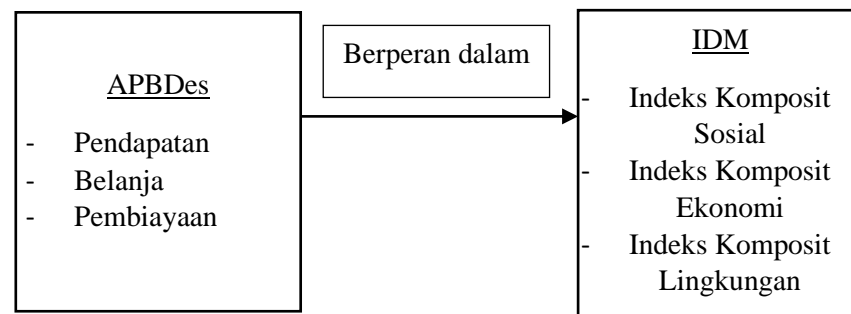
Kerangka berpikir adalah model (gambar) yang pada dasarnya diturunkan dari beberapa teori maupun konsep yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dan alur kerangka yang mengacu pada langkah-langkah penelitian. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Anggaran pendapatan dan belanja desa sebagai upaya dalam mencapai tujuan desa dengan melihat tiga aspek yang terdapat dalam indeks desa membangun yaitu, indeks komposit sosial, indeks komposit ekonomi dan indeks komposit lingkungan. Untuk meningkatkan skor nilai IDM dan meningkatkan status desa. Desa Binusan memiliki tantangan dalam mengelola anggaran agar dapat memperluas perekonomian di Desa Binusan.

Anggaran Desa Binusan diharapkan dapat meraih suatu capaian dalam memanfaatkan keuangan desa. Agar desa menjadi lebih efektif dalam penggunaan baik itu dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Binusan yaitu peningkatan pada aspek sosial dengan meningkatkan layanan Pendidikan bagi masyarakat Desa Binusan dan juga meningkatkan pada layanan kesehatan di Desa Binusan. Selain itu anggaran juga dapat dipergunakan dalam hal untuk mengantisipasi dan tanggap terhadap bencana alam.

Dengan adanya pengukuran dan penilaian dari data Indeks Desa Membangun diharapkan pemerintah Desa Binusan dapat terus memanfaatkan anggaran desa sesuai dengan kebutuhan desa dan rekomendasi serta prioritas dari

IDM. Agar dapat melihat bagaimana peran anggaran desa untuk berperan dalam meningkatkan nilai indeks desa membangun dan status desa berdasarkan tiga aspek yang terdapat dalam indeks desa membangun. Berikut kerangka pikir yang dibangun dalam memecahkan masalah dalam penelitian.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Sumber: Dikembangkan dalam penelitian ini

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Kualitatif menurut Sugiyono (2017) “metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, peneliti adalah sebagai instrument kunci”.

3.2 Definisi Operasional

3.2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang terdiri atas Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa.

3.2.2 Klasifikasi Belanja

Klasifikasi Belanja terdiri atas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembiayaan kemasyarakatan, pemerdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

3.2.3 Indeks Desa Membangun (IDM)

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks yang digunakan yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indek Ketahanan Ekologi/Lingkungan.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian terkait dengan Peran anggaran dan belaja desa dalam mendukung capaian Indeks Desa Membangun (IDM) dilakukan di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

3.4 Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan Sumber data Primer. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2022). Data dikumpul sendiri oleh peneliti secara langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data primer pada penelitian ini adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan mengenai topik penelitian.

Dalam penelitian ini juga sumber data yang digunakan yaitu data sekunder, sumber data sekunder adalah sumber data tambahan yang diambil secara tidak langsung dari lapangan, data ini diambil dari sumber yang telah ada dibuat oleh orang lain, yaitu: buku, dokumen, foto dan statistik. Dalam penelitian sumber data sekunder dapat digunakan dalam fungsinya sebagai sumber data pelengkap maupun yang utama apabila tidak tersedia narasumber dalam fungsinya sebagai sumber data primer (Nugrahani, 2014). Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data yang telah tersedia di kantor Desa Binusan dan telah dipublikasikan oleh Lembaga atau institusi tertentu yang bersumber dari Kementerian Desa.

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lengkap tentang “Peran Anggaran dan Belanja Desa dalam Mendukung Capaian Indeks Desa Membangun Di Desa Binusan Kabupaten Nunukan”.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu proses dan cara yang dapat digunakan seorang penulis dalam mendapatkan data yang dibutuhkan. Teknik Pengumpulan data merupakan Langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Satori & Komriah, 2013). Setiap penelitian baik itu penelitian kualitatif maupun kuantitatif tentunya menggunakan Teknik dalam hal mengumpulkan data yang dibutuhkan. Tujuan dalam hal ini adalah untuk memudahkan penulis dalam memperoleh data-data yang akurat.

3.5.1 Wawancara

Langkah pertama yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data adalah dengan metode wawancara semi terstruktur. Flanagan (1999) mengungkapkan bahwa wawancara adalah proses komunikasi yang dilakukan oleh *interviewer* dengan *interviewee*. Wawancara merupakan kegiatan komunikasi antara dua pihak atau lebih yang dilakukan dengan tatap muka dengan salah satu pihak berperan sebagai *interviewer* dan pihak lainnya berperan sebagai *interviewee* dengan memiliki tujuan tertentu, seperti halnya untuk mendapatkan informasi atau mengumpulkan data. *Interviewer*

menyatakan beberapa pertanyaan kepada *interviewee* untuk mendapatkan jawaban (Fadhallah, 2021).

Informan adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam suatu penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah perangkat pemerintah desa yang memahami pengelolaan keuangan desa dan program pembangunan desa menurut IDM. Informan dalam penelitian ini yang akan diwawancarai adalah kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan sekretaris desa. Peneliti memilih Kepala Desa Sebagai Informan karena dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang diubah dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan dalam pasal 3 (tiga), yaitu:

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan keuangan desa, mempunyai kewenangan:
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. Menetapkan PTPKD;
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan

- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Peneliti juga memilih Sekertaris Desa sebagai informan karena dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang diubah dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan dalam pasal 5 (lima), yaitu:

- (1) Sekertaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
- (2) Sekertaris Desa selaku coordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa, mempunyai tugas:
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 - b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
 - c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - d. Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 - e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Peneliti melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan semi-terstruktur dengan tujuan agar peneliti dapat menemukan permasalahan secara lebih terbuka dengan meminta pendapat dan mendengarkan gagasan-gagasan dari informan yang akan memberikan topik penelitian secara lebih mendalam. Adapun beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada informan, yaitu:

- Bagaimana proses awal dari penyusunan APBDes?
- Siapa yang berperan dalam proses penyusunan pada APBDes?
- Bagaimana mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDes?
- Bagaimana penyusunan anggaran Desa Binusan sehingga berhasil meningkatkan nilai IDM dalam kurun tiga tahun terakhir yaitu 2020-2022?
- Apakah ada masalah yang ditemui pada saat penyusunan anggaran?
- Apakah perangkat Desa Binusan mengetahui apa saja yang menjadi rekomendasi pada Indeks Desa Membangun?
- Siapa saja yang terlibat dalam pembangunan desa?
- Apa saja program yang telah dilakukan dalam penyusunan APBDes dalam mencapai setiap indikator yang ada pada IDM?
- Bagaimana cara perangkat desa menyikapi terkait hal yang menjadi rekomendasi pada IDM?
- Apakah pelaksanaan program yang ada telah berperan dalam kelancaran proses pembangunan di Desa Binusan?

- Apakah pelaksanaan program memiliki kendala pada saat proses pembangunan di Desa Binusan?
- Apakah masyarakat ikut berperan dalam kegiatan pembangunan desa?

3.5.2 Dokumentasi

Metode pengumpulan data yang akan dilakukan oleh penulis adalah dokumentasi. Gottschalk (1986) mengungkapkan bahwa para ahli sering mengartikan dokumen dalam dua pengertian, yaitu: pertama, sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari pada kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan terlukis, dan petilasan-petilasan arkeologis. Kedua, diperuntukan bagi surat-surat resmi dan surat-surat negara seperti surat perjanjian, undang-undang, hibah, konsesi dan lainnya (Satori & Komriah, 2013).

Dokumentasi adalah mengumpulkan data-data yang telah diperoleh dari dokumen-dokumen dan Pustaka sebagai bahan yang akan dianalisis oleh peneliti dalam penelitian ini. Metode yang digunakan dalam mencatat data-data sekunder yang telah tersedia dalam bentuk arsip atau dokumen-dokumen. Metode ini digunakan untuk mengetahui data dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal yang akan di teliti oleh penulis. Data berupa dokumen seperti ini dapat digunakan untuk mengetahui informasi yang pernah terjadi dimasa silam atau dimasa lampau.

Dalam penelitian ini dokumen yang dibutuhkan adalah dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020-2022, RPJM Desa dan dokumen Indeks Desa Membangun (IDM).

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Deskriptif Kualitatif. Analisis adalah suatu usaha dalam menguraikan suatu permasalahan atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (*decomposition*) sehingga susunan sesuatu bentuk yang dijabarkan dapat terlihat dengan jelas dan dapat lebih jelas dipahami makna yang terdapat didalamnya serta dapat dimengerti dengan lebih jelas lagi permasalahan yang terdapat didalamnya (Satori & Komriah, 2013).

Untuk menjawab rumusan masalah tentang “Bagaimana Peran Anggaran dan Belanja Desa dalam Mendukung Capaian Indeks Desa Membangun Desa Binusan?” dengan batasan penelitian pengelolaan APBDes desa dalam mendukung capaian Indeks Desa Membangun.

Menurut Creswell (2015) analisis data terdiri dari beberapa langkah. Langkah- langkah tersebut yaitu, (1) Mengorganisasikan dan menyiapkan data yang akan dianalisis, (2) Baca dan lihat seluruh data, (3) Membuat koding seluruh data, (4) Menggunakan koding sebagai bahan untuk membuat deskripsi, (5) Menghubungkan antar tema, (6) Memberi interpretasi dan makna tentang tema.

1) Mengorganisasikan dan menyiapkan data yang akan dianalisis

Mengelompokkan data yang akan dianalisis berdasarkan tanggal pengumpulan data, sumber data, jenis data, deskripsi data dan sifat data (Sugiyono, 2022).

2) Baca dan lihat seluruh data

Peneliti membaca seluruh data yang telah terkumpul agar dapat mengetahui data apa saja yang telah diperoleh, sumber data dan maknanya. Peneliti harus mengetahui informasi apa aja yang disampaikan oleh informan. Dengan memahami seluruh data, maka peneliti akan dapat memilih data mana yang penting, yang baru, yang unik dan data mana yang terkait dengan pertanyaan penelitian, selanjutnya peneliti juga harus dapat

memilah/mengklasifikasikan/mengkategorisasikan/mengelompokkan/membuat tema pada data-data yang telah dipilih (Sugiyono, 2022).

3) Membuat koding seluruh data

Koding merupakan proses pemberian tanda pada data yang telah dikelompokkan. Kelompok data yang sejenis diberi kode yang sama. Koding dapat dilakukan secara manual ataupun dengan komputer. Melalui koding peneliti dapat menghasilkan tema yang baru (Sugiyono, 2022). Seperti proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa.

4) Menggunakan koding sebagai bahan untuk membuat deskripsi

Melalui koding, peneliti menghasilkan tema-tema data penelitian yang merupakan temuan. Dari tema-tema yang dihasilkan peneliti membuat

deskripsi secara singkat dan sistematis agar tema-tema yang ditemukan dapat menjadi lebih jelas. Deskripsi dimulai dari penjelasan bahwa tema itu adalah suatu temuan baru, yang dimulai dari hal umum sampai dengan yang spesifik (Sugiyono, 2022).

5) Menghubungkan antar tema

Setelah peneliti membuat kategori data yang disusun pada tema-tema penelitian, sehingga langkah selanjutnya adalah mencari adakah hubungan antar tema satu dengan tema yang lainnya.

6) Memberi interpretasi dan makna tentang tema

Hasil menstrukturkan hubungan antar tema atau kategori selanjutnya perlu diberikan interpretasi sehingga orang lain dapat memahaminya dengan mudah.

BAB IV

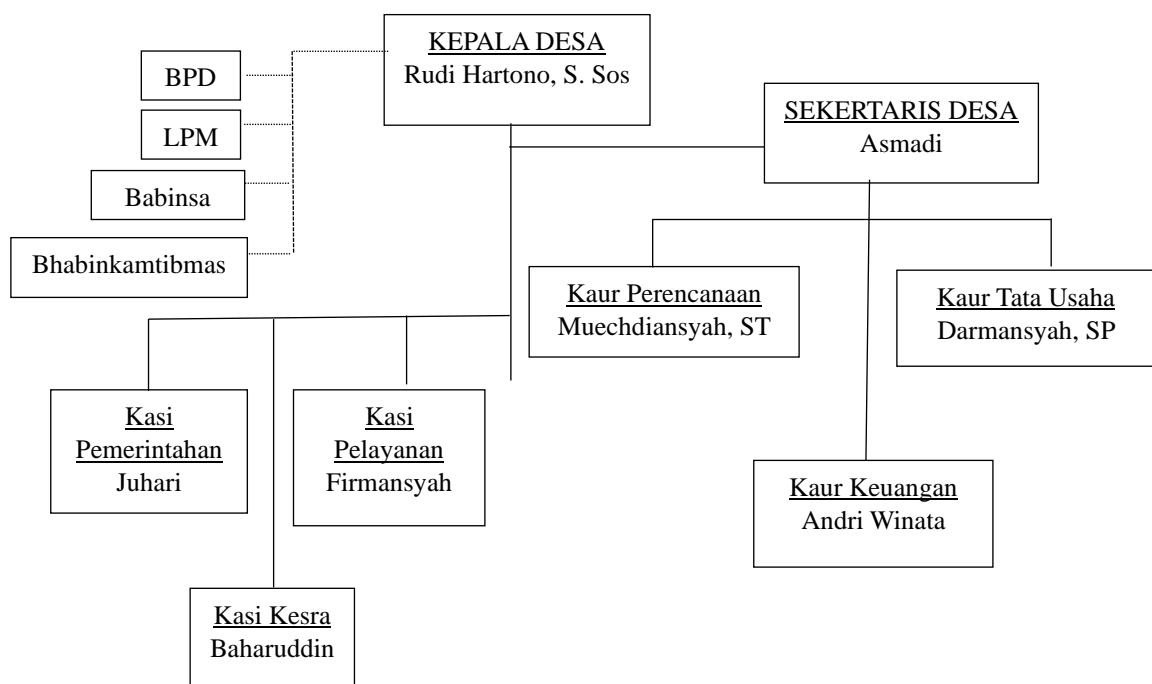
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Desa Binusan adalah bagian integral dari Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara dengan luas wilayah 95,540 Km atau 54.627.35 Ha. Desa Binusan berada diketinggian dari permukaan laut kurang lebih 300 meter dengan tofografi daratan rendah dengan batas-batas wilayah, diataranya sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Nunukan Barat, sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Sulawesi, sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Nunukan Selatan dan sebelah Barat berbatasan dengan Selat Lucia. Desa Binusan berdiri tahun 2003 yang disahkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Desa Binusan, Desa Liang Bunyu, Desa Sanur dan Desa Makmur dalam wilayah Kabupaten Nunukan. Kepemimpinanan Desa Binusan dijabat oleh Rudi Hartono, S. Sos sebagai Kepala Desa Ketiga untuk periode 2019 s/d 2025 yang sebelumnya dipimpin oleh M. Untung. Desa Binusan memiliki 15 Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah penduduk 5.272 jiwa dengan 1.350 jumlah KK. Dari jumlah tersebut berdasarkan jender dapat dirinci penduduk laki-laki 2.934 jiwa dan penduduk perempuan 2.338 jiwa.

Desa Binusan Kecamatan Nunukan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan adalah sebagai perangkat daerah yang memiliki wilayah dan secara langsung memberikan pelayanan kepada

masyarakat serta memiliki tugas pokok dan fungsi pemerintahan dengan susunan Struktur Organisasi Desa Binusan Kecamatan Nunukan terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala BPD, Kepala LPM, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Kaur Perencanaan, Kaur Keuangan, Kaur Tata Usaha, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesra dan Kasi Pelayanan. Berikut ini bagan struktur organisasi dan rincian masing-masing perangkatnya.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Binusan

Desa Binusan juga memiliki visi dan misi, yaitu sebagai berikut:

1. Visi

Membangun Desa Binusan menjadi Desa yang Maju, Mandiri, Adil dan Sejahtera yang berorientasi kepada Desa Wisata.

2. Misi

- Mengoptimalkan kinerja perangkat desa secara maksimal, profesional dan transparan
- Meningkatkan SDM dan memanfaatkan SDA untuk kesejahteraan masyarakat.
- Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur, transparan dan bermanfaat bagi masyarakat Desa Binusan.
- Meningkatkan koordinasi Lembaga Pemerintah, Lembaga Adat, BPD, Ketua RT, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda demi terciptanya Desa Binusan sebagai Desa yang dinamis, berbudaya, toleran, aman dan damai.
- Peningkatan pembangunan di sektor wisata, seperti pengawasan dan penataan Hutan Alam, Hutan Mangrove, termasuk pula wisata pertanian dan perikanan.
- Menyelenggarakan pengelolaan pembangunan Desa secara partisipatif.
- Mengembangkan Kerjasama dengan instansi pemerintah vertikal, Desa lain, swasta dan pihak ketiga lainnya. Untuk mendukung pembangunan desa khususnya pengembangan perekonomian rakyat dan pelayanan publik bagi masyarakat.
- Melestarikan dan menggali seni Budaya lokal agar dapat menarik minat wisatawan Manca Negara.

Berikut ini gambaran umum keadaan soaial, ekonomi dan lingkungan di Desa Binusan berdasarkan RPJMDes Desa Binusan tahun 2020-2022.

1) Sarana Transportasi

Jalan umum Desa Binusan sepenuhnya sudah di aspal, sementara sisanya jalan yang beraspal akan tetapi masih dalam kondisi rusak. Sebagian yang lainnya masih dalam kategori jalan tanah yang berbentuk badan jalan dan Sebagian lainnya sudah pengerasan. Sementara untuk gang masih banyak yang belum dicor (semenisasi) dan sisanya masih berupa jalan tanah yang masih dalam kondisi yang memprihatinkan dan sangat membutuhkan peningkatan status karena tingginya aktifitas masyarakat di sekitar gang tersebut. Sementara kebutuhan jembatan untuk menghubungkan jalan masih kekurangan sekitar 80% dari jumlah kebutuhan yang ideal.

2) Sarana Pendidikan

Sebagai daerah pedesaan Desa Binusan mempunyai sarana Pendidikan yang kurang memadai hanya mempunyai 4 (empat) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yaitu Bintang Sejahtera, Kusuma Bangsa, Tunas Bangsa dan Aisyah. Mempunyai 4 (empat) Sekolah dasar yaitu SDN 006, SDN 009, SDN 012 dan SDN 013. Mempunyai 2 (Dua) Sekolah Tingkat Lanjutan Pertama (SLTP) yaitu SMPN 3 dan SMPN 2. Dan juga mempunyai satu Sekolah Luar Biasa.

3) Sarana Olahraga

Di Desa Binusan terdapat sarana olahraga yang juga menunjang dan menjadi hiburan masyarakat Desa yaitu terdapat sarana olahraga Sepak Bola, Bola Voli, Bulu Tangkis dan sanggar Tari.

4) Sarana Kesehatan

Kesehatan menjadi indikator vital bagi perkembangan suatu daerah, sehingga diharapkan pemerintah kabupaten maupun Pemerintah Desa dapat mengupayakan penyediaan sarana prasarana kesehatan yang mudah urusannya, murah dan baik pelayanannya kepada masyarakat. dengan mudahnya akses terhadap fasilitas kesehatan diharapkan berbagai keluhan kesehatan yang ada dapat segera ditangani dan tidak menimbulkan gangguan kesehatan yang serius, dengan demikian diharapkan derajat kesehatan masyarakat meningkat. Desa Binusan Terdapat satu Rumah Sakit Umum, 2 (dua) Puskesmas Pembantu dan 4 (empat) Posyandu yang aktif.

5) Mata Pencaharian

Desa Binusan memiliki lahan pertanian yang cukup luas sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mata Pencahariaan yang ada di Desa Binusan yaitu Pertanian 30%, Perikanan 30%, Perkebunan 20% dan Perternakan 10%.

6) Sarana Industri dan Koperasi

Desa Binusan memiliki beberapa industry kecil yang sangat diharapkan bisa terus berkembang diantaranya kerajinan Muebelair, Industri Batako, Batu bata, tahu tempe dan kerupuk. Sementara koperasi masih sangat minim karena masih kurangnya kesadaran warga akan pentingnya koperasi.

Gambaran umum Desa Binusan yang telah disebutkan berhubungan langsung dengan keadaan dan masalah desa, serta adanya potensi yang mendukung capaian indeks desa membangun pada aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Namun pada pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang menghambat pengelolaan kegiatan seperti kurangnya dana anggaran, dengan ini peneliti berupaya memahami lebih dalam mengenai pelaksanaan pembangunan desa yang direncanakan dalam anggaran desa oleh pemerintah desa sesuai dengan rekomendasi Indeks Desa Membangun Desa Binusan melalui wawancara dengan informan dan analisis data yang ada untuk mendapatkan tema-tema dan hasil pembahasan.

4.2 Hasil Penelitian

Sebelum penulis menguraikan hasil penelitian sebagaimana lingkup penelitian atau operasional konsep yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa penelitian ini dipusatkan untuk mengetahui Peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Mendukung Capaian Indeks Desa Membangun Desa Binusan Kabupaten Nunukan dengan memperhatikan beberapa aspek dalam indeks Desa Membangun. Dikarenakan masih minimnya infrastruktur yang terdapat di Desa Binusan, dengan adanya APBDes yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa diharapkan dapat meningkatkan tiga aspek yang terdapat dalam indeks desa membangun.

4.2.1 Peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. APBDes yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasayarakatan dan Pembiayaan Masyarakat. Adapun ketentuan yang mengatur tentang Dana Desa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 yang merupakan salah satu regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai wujud peyelenggaraan Undang-Undang Desa. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang di dalamnya menjelaskan bahwa penerimaan desa dapat bersumber dari Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Mengacu pada Peraturan Bupati Nunukan Nomor 02 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2020, atas dasar peraturan ini maka Pemerintah Desa Binusan memperoleh Besaran Dana Desa yang digunakan untuk

Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemeberdayaan Masyarakat. Dan juga mengacu pada keputusan Bupati Nunukan Nomor: 188.45/18/I/2020 tentang Penetapan Besar Alokasi Dana Desa dalam wilayah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2020. Atas dasar peraturan-peraturan ini maka Pemerintah Desa Binusan memperoleh Besaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk membiayai peyelenggaraan pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat dengan Nilai Besaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk 3 (Tiga) Tahun yaitu tahun 2020-2022 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 4.1 Nilai Besaran Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa
Desa Binusan Kecamatan Nunukan Tahun 2020-2022**

	2020	2021	2022
Dana Desa	Rp 2.603.371.000	Rp 3.264.846.000	Rp 1.479.771.000
Alokasi Dana Desa	Rp 1.100.209.946	Rp 1.007.747.516	Rp 964.770.612
APBDes	Rp 3.703.580.946	Rp 4.272.593.516	Rp 2.444.541.612

Sumber: Laporan APBDes Desa Binusan

Kemudian, melalui Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang diubah dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kedua sumber penerimaan tersebut dikelola dan dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam rangka membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa. Sehubungan dengan hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan menetapkan dan mengatur pengelolaan keuangan Desa yang dituangkan pada Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Perbup ini menjelaskan bahwa kewenangan Kepala Desa yaitu menetapkan kebijakan tentang Pelaksanaan APBDes. Selain

itu, Pemerintah Desa Binusan juga menetapkan kebijakan lain yang berkaitan dengan penggunaan Dana Desa yang diprioritaskan untuk membiayai Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, dalam hal ini penggunaan Dana Desa ini mengacu pada rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana kerja Pemerintah Desa yang terdapat dalam PP Nomor 8 Tahun 2016. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Binusan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) sebagai wujud kebijakan Pemerintahan Desa Binusan yang dituangkan kedalam peraturan Desa Binusan.

4.2.1.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)

Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa. Penyusunan RPJM Desa dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten.

Penyusunan RPJM Desa oleh Pemerintah Desa Binusan diketahui bahwa RPJM Desa telah ditentukan oleh Pemerintah Desa Binusan berupa Peraturan Desa Binusan Nomor 09 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) Tahun 2019-2025.

Tabel 4.2 Daftar Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa) Desa Binusan Kabupaten Nunukan Tahun 2019-2025

No	Program Pembangunan
	Bidang Pemerintahan
1.	Kelengkapan Peralatan Kantor, Peralatan Rumah tangga dan Operasional Administrasi Desa
2.	Kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa
3.	Kesejahteraan dan operasional BPD
4.	Operasional Lembaga Masyarakat Desa
5.	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
6.	Penertiban dan Akurasi data
7.	Penyusunan Administrasi Desa
8.	Penyelenggaraan Administrasi Desa
9.	Pengelolaan Administrasi
10.	Penetapan Batas Desa/RT
	Bidang Pembangunan
1.	Pembangunan dan rehap Gedung Kantor Desa
2.	Pembangunan Lapangan Desa
3.	Pembangunan Jalan Desa
4.	Pembangunan Infrastruktur Irigasi Desa
5.	Pembangunan Jembatan
6.	Pembangunan Pemenuhan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat
7.	Pembangunan Fasilitas Pendidikan
8.	Pembangunan Kesehatan Masyarakat
9.	Pembangunan Sarana Kesehatan Masyarakat
10.	Tata Ruang Desa dan Pembangunan Infrastruktur Desa
	Bidang Pembinaan Masyarakat
1.	Pembinaan Lembaga Desa
2.	Pembinaan Keagamaan
3.	Peringatan Hari-hari Besar
4.	Pendataan KK Miskin, Warga Putus Sekolah dan Warga Buta Huruf
5.	Peningkatan Keamanan dan wawasan kebangsaan Masyarakat
6.	Kepedulian Peningkatan Kesehatan
7.	Pembinaan Kelompok Kesenian
8.	Pembinaan Pendidikan
9.	Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga
10.	Pembinaan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
	Bidang Kesejahteraan Masyarakat
1.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dan Lembaga Desa
2.	Peningkatan Kesejahteraan Kelompok Tani, Ternak dan Perikanan
3.	Peningkatan Kesejahteraan Kepemudaan dan Olahraga
4.	Peningkatan Kegotong royongan Masyarakat
5.	Peningkatan Kesehatan Masyarakat

6.	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan
7.	Peningkatan Kelompok Kesenian
8.	Peningkatan Keamanan Masyarakat

Sumber: RPJM-Desa Binusan Kabupaten Nunukan Tahun 2019-2025

Dari Tabel 4.2 dapat dilihat rencana pembangunan Desa Binusan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu tahun 2019 sampai dengan tahun 2025 yang tertuang dalam RPJM-Desa Desa Binusan. Program pembangunan tersebut terdiri dalam 4 (empat) Bidang, yaitu Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Kesejahteraan Masyarakat. Dalam hal ini Desa Binusan melakukan penyusunan rencana pembangunan desa dengan strategi untuk mencapai arah dan tujuan pembangunan desa agar didapatkan hasil yang maksimal, perencanaan pembangunan diharapkan dapat tepat sasaran dan hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat.

4.2.1.2 RKP Desa Binusan Tahun Anggaran 2020-2022

Perencanaa selanjutnya oleh Desa Binusan adalah Menyusun Rencana Kerja Pemerintahan Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang direncanakan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerinthan (RKP).

Berdasarkan Peraturan Desa Binusan Nomor 9 Tahun 2019 tentang RPJMDes Desa Binusan pada tahun 2019-2025 prioritas masalah yang harus diselesaikan pada tahun 2020 meliputi: pengembangan wilayah dan pemerataan pembangunan serta Pendidikan dan kesehatan. Juga terdapat beberapa akses jalan menuju ke wilayah pemukiman sulit terjangkau atau masih kebanyakan jalan tanah sehingga pada saat musim penghujan jalan tersebut tidak dapat dilewati. Hal ini sangat berpengaruh dengan perkembangan perekonomian warga dan Pendidikan anak-anak dan kesehatan. Pemerintah Desa Binusan sangat merespon hal ini sehingga untuk perencanaan pembangunan diprioritaskan pada akses jalan dan pembangunan PAUD di wilayah tersebut yang telah tersusun pada APBDes Desa Binusan.

Seperti yang dikatakan oleh Kepala Desa Binusan bahwa lebih mengutamakan yang prioritas dalam penggunaan anggaran, dalam wawancara "*melaksanakan musyawarah penyusunan anggaran dan diambil yang betul-betul prioritas untuk pembangunan di Desa Binusan*". Sehingga dalam wawancara ini dapat diperjelas bahwa desa Binusan melaksanakan peraturan dengan baik dan mengutamakan kepentingan masyarakat yang menjadi hal prioritas demi kesejahteraan dan kemajuan Desa.

Tabel 4.3 Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Binusan Kabupaten Nunukan Tahun 2020

KD	Bidang/Sub Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Satuan	Biaya (Rupiah)
	Bidang/Sub Bidang	Jenis Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7
1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA					
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjanagn Kepala Desa	Desa Binusan	28	OB	Rp 62.500.000
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjanagn Perangkat Desa	Desa Binusan	168	OB	Rp 171.000.000
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	Desa Binusan	1	Pkt	Rp 483.950.796
		Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Binusan	60	OB	Rp 88.800.000
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Desa Binusan	1	Pkt	Rp 11.500.000
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Binusan	210	OB	Rp 210.000.000
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Desa Binusan	1	Pkt	Rp 69.930.000
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Binusan	1	Pkt	Rp 34.200.000
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Desa Binusan	1	Pkt	Rp 55.000.000
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Desa Binusan	1	Pkt	Rp 2.000.000
		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Desa Binusan	1	Pkt	Rp 2.000.000
JUMLAH PER BIDANG						Rp 1.190.880.796

KD	Bidang/Sub Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Satuan	Biaya (Rupiah)
	Bidang/Sub Bidang	Jenis Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7
2.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DESA					
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Desa Binusan	180	OB	Rp 72.000.000
		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	Desa Binusan	1	Pkt	Rp 25.000.000
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah	Desa Binusan	1	Unit	Rp 60.000.000
		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumis, Lansia, Insentif)	Desa Binusan	740	OB	Rp 148.195.000
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Binusan	1	Pkt	Rp 6.600.000
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Desa Binusan	1	Unit	Rp 129.500.000
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman (Dipilih)	Desa Binusan	1	Unit	Rp 841.509.826
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	Desa Binusan	1	Unit	Rp 30.000.000
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan dll)	Desa Binusan	2	Unit	Rp 60.178.000
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)	Desa Binusan	1	Pkt	Rp 14.200.000
		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab	Desa Binusan	1	Pkt	Rp 183.340.000

KD	Bidang/Sub Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Satuan	Biaya (Rupiah)
	Bidang/Sub Bidang	Jenis Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7
		Rumah Tidak Layak Huni GAKIN				
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)	Desa Binusan	1	Unit	Rp 135.400.000
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	Desa Binusan	1	Pkt	Rp 83.700.000
	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Hutan Milik Desa	Desa Binusan	1	Pkt	Rp 18.260.000
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster,Baliho Dll)	Desa Binusan	1	Pkt	Rp 25.000.000
	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	Desa Binusan	1	Pkt	Rp 4.000.000
	Sub Bidang Pariwisata	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa (Dipilih)	Desa Binusan	1	Pkt	Rp 308.200.000
JUMLAH PER BIDANG						Rp 2.145.082.826
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN					
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Peyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)		Desa Binusan	1	Pkt	Rp 87.142.500
	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa (Dipilih)		Desa Binusan	1	Pkt	Rp 105.000.000
Sub Bidang Kepemudaan dan	Peyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa		Desa Binusan	1	Pkt	Rp 5.950.000
	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan		Desa Binusan	1	Pkt	Rp 46.000.000

KD	Bidang/Sub Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Satuan	Biaya (Rupiah)	
	Bidang/Sub Bidang	Jenis Kegiatan					
1	2	3	4	5	6	7	
	Olahraga	Olahraga Tingkat Desa					
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	Desa Binusan	1	Pkt	Rp 1.500.000	
		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Desa Binusan	1	Pkt	Rp 82.400.000	
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan Lembaga Adat	Desa Binusan	48	OB	Rp 36.000.000	
		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Binusan	108	OB	Rp 29.400.000	
		Pembinaan PKK	Desa Binusan	1	Pkt	Rp 25.000.000	
		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Desa Binusan	3	Keg	Rp 16.025.000	
JUMLAH PER BIDANG						Rp 434.417.500	
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa		Desa Binusan	1	Keg	Rp 7.000.000	
	Peningkatan Kapasitas BPD		Desa Binusan	1	Keg	Rp 6.200.000	
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang di laksanakan oleh Pemdes)		Desa Binusan	1	Keg	Rp 6.300.000	
JUMLAH PER BIDANG						Rp 19.500.000	
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK							
5.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana		Desa Binusan	1	Keg	Rp 20.000.000
	Sub Bidang Keadaan Darurat	Penanganan Keadaan Darurat		Desa Binusan	1	Pkt	Rp 10.000.000

KD	Bidang/Sub Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Satuan	Biaya (Rupiah)
	Bidang/Sub Bidang	Jenis Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PER BIDANG					Rp 30.000.000
	JUMLAH TOTAL					Rp 3.819.881.122

Sumber: RKP- Desa Binusan, 2020

Tabel 4.4 Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Binusan Kabupaten Nunukan Tahun 2021

KD	Bidang/Sub Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Satuan	Biaya (Rupiah)
	Bidang/Sub Bidang	Jenis Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7
1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA					
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjanagn Kepala Desa	Desa Binusan	28	OB	Rp 63.000.000
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjanagn Perangkat Desa	Desa Binusan	168	OB	Rp 189.000.000
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	Desa Binusan	1	Pkt	Rp 424.931.516
		Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Binusan	77	OB	Rp 96.200.000
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Desa Binusan	1	Pkt	Rp 3.000.000
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Binusan	210	OB	Rp 210.000.000
	Penyediaan Sarana Prasarana	Penyediaan Sarana (Aset Tetap)	Desa Binusan	1	Pkt	Rp 6.616.000

KD	Bidang/Sub Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Satuan	Biaya (Rupiah)
	Bidang/Sub Bidang	Jenis Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7
	Pemerintahan Desa	Perkantoran/Pemerintahan				
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Desa Binusan	1	Pkt	Rp 64.440.000
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Desa Binusan	1	Pkt	Rp 7.500.000
		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Desa Binusan	1	Pkt	Rp 7.500.000
		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	Desa Binusan	1	Pkt	Rp 577.705
JUMLAH PER BIDANG						Rp 1.072.765.221
2.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DESA					
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Desa Binusan	180	OB	Rp 72.000.000
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah	Desa Binusan	3	Unit	Rp 230.000.000
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polides Milik Desa (Obat, Insentif, KB, dsb)	Desa Binusan	1	Pkt	Rp 8.280.000
		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	Desa Binusan	740	OB	Rp 99.150.000
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Desa Binusan	1	Pkt	Rp 25.528.000

KD	Bidang/Sub Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Satuan	Biaya (Rupiah)
	Bidang/Sub Bidang	Jenis Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Binusan	1	Pkt	Rp 77.390.000
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Desa Binusan	1	Pkt	Rp 9.000.000
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman (Dipilih)	Desa Binusan	2	Unit	Rp 157.101.650
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	Desa Binusan	3	Unit	Rp 198.341.400
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	Desa Binusan	2	Unit	Rp 130.000.000
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)	Desa Binusan	1	Pkt	Rp 70.000.000
	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Hutan Milik Desa	Desa Binusan	1	Pkt	Rp 39.600.000
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster,Baliho DII)	Desa Binusan	1	Pkt	Rp 45.000.000
		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Desa Binusan	1	Pkt	Rp 7.000.000
	Sub Bidang Pariwisata	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa (Dipilih)	Desa Binusan	6	Pkt	Rp 734.926.641

KD	Bidang/Sub Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Satuan	Biaya (Rupiah)
	Bidang/Sub Bidang	Jenis Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7
JUMLAH PER BIDANG						Rp 1.903.317.691
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN					
	Sub Bidang Ketentaraan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Desa Binusan	1	Pkt	Rp 80.000.000
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Peyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Desa Binusan	1	Pkt	Rp 138.800.000
		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa (Dipilih)	Desa Binusan	1	Pkt	Rp 144.422.294
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Peyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	Desa Binusan	1	Pkt	Rp 11.865.000
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan Lembaga Adat	Desa Binusan	84	OB	Rp 63.000.000
		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Binusan	108	OB	Rp 29.400.000
		Pembinaan PKK	Desa Binusan	1	Pkt	Rp 25.000.000
		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Desa Binusan	2	Keg	Rp 34.320.000
JUMLAH PER BIDANG						Rp 526.807.294
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Desa Binusan	1	Pkt	Rp 46.512.000
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang di laksanakan oleh Pemdes)	Desa Binusan	1	Keg	Rp 13.879.000
JUMLAH PER BIDANG						Rp 60.391.000
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK						

KD	Bidang/Sub Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Satuan	Biaya (Rupiah)
	Bidang/Sub Bidang	Jenis Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	Desa Binusan	200	KK	Rp 646.488.000
JUMLAH PER BIDANG						Rp 646.488.000
JUMLAH TOTAL						Rp 4.209.769.206

Sumber: RKP- Desa Binusan, 2021

Tabel 4.5 Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Binusan Kabupaten Nunukan Tahun 2022

KD	Bidang/Sub Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Satuan	Biaya (Rupiah)
	Bidang/Sub Bidang	Jenis Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7
1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA					
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjanagn Kepala Desa	Desa Binusan	12	OB	Rp 67.500.000
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjanagn Perangkat Desa	Desa Binusan	168	OB	Rp 189.000.000
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Binusan	72	OB	Rp 12.973.296
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian)	Desa Binusan	1	Pkt	Rp 437.724.513
		Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Binusan	77	OB	Rp 96.200.000
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Desa Binusan	1	Pkt	Rp 3.000.000
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Binusan	195	OB	Rp 195.000.000

KD	Bidang/Sub Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Satuan	Biaya (Rupiah)	
	Bidang/Sub Bidang	Jenis Kegiatan					
1	2	3	4	5	6	7	
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Desa Binusan	1	Pkt	Rp	6.616.000
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Desa Binusan	1	Pkt	Rp	13.390.000
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Desa Binusan	1	Pkt	Rp	3.000.000
		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	Desa Binusan	1	Pkt	Rp	577.705
JUMLAH PER BIDANG						Rp 1.024.981.514	
2.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DESA						
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Desa Binusan	180	OB	Rp	72.000.000
		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	Desa Binusan	1	Pkt	Rp	25.000.000
		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	Desa Binusan	384	OB	Rp	93.950.000
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Desa Binusan	1	Pkt	Rp	23.088.000
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Binusan	1	Pkt	Rp	118.216.800
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Desa Binusan	1	Pkt	Rp	-

KD	Bidang/Sub Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Satuan	Biaya (Rupiah)	
	Bidang/Sub Bidang	Jenis Kegiatan					
1	2	3	4	5	6	7	
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (Dipilih)	Desa Binusan	2	Unit	Rp 95.617.195	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan dll)	Desa Binusan	1	Unit	Rp 95.954.200	
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster,Baliho Dll)	Desa Binusan	1	Pkt	Rp 12.500.000	
	JUMLAH PER BIDANG						Rp 536.326.195
	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN						
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa (Dipilih)	Desa Binusan	1	Pkt	Rp 47.000.000	
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan Lembaga Adat	Desa Binusan	84	OB	Rp 63.000.000	
		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Binusan	108	OB	Rp 29.400.000	
		Pembinaan PKK	Desa Binusan	1	Pkt	Rp 9.500.000	
		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Desa Binusan	1	Pkt	Rp 27.028.000	
	JUMLAH PER BIDANG						Rp 175.928.000
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						

KD	Bidang/Sub Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Satuan	Biaya (Rupiah)
	Bidang/Sub Bidang	Jenis Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Desa Binusan	1	Pkt	Rp 200.000.000
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang di laksanakan oleh Pemdes)	Desa Binusan	1	Keg	
JUMLAH PER BIDANG						Rp 200.000.000
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK						
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	Desa Binusan	150	KK	Rp 594.000.000
JUMLAH PER BIDANG						Rp 594.000.000
JUMLAH TOTAL						Rp 2.531.235.709

Sumber: RKP- Desa Binusan, 2022

Dari Tabel 4.3, Tabel 4.4 dan Tabel 4.5 dapat dilihat rincian perencanaan Pemerintah Desa Binusan setiap tahun yang dalam kurun 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2020, 2021 dan 2022. Dalam Peraturan Desa Binusan Nomor 05 Tahun 2020 Desa Binusan terkait perencanaan pembangunan desa mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 63 dan Pasal 64, serta Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Dalam hal pembangunan desa, Desa Binusan memiliki prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan untuk menggulangi permasalahan yang timbul dimasyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap pemenuhan kebutuhan hak-hak dasar masyarakat seperti Pendidikan, kesehatan, pendapatan dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan Desa Binusan secara langsung dapat berperan aktif dalam menaggualangi kemiskinan pada level desa. Dan dapat dilihat juga dari rincian RKP-Desa diatas dalam setiap tahunnya kegiatan yang akan dilaksanakan Desa Binusan mengalami penambahan kegiatan setiap Bidang dan juga mengalami pengurangan kegiatan atau peniadaan kegiatan disebabkan karena kurangnya anggaran yang diterima oleh Desa Binusan, sehingga setiap kegiatan atau perencaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Binusan dapat dilihat ternggantung pada jumlah besaran anggaran yang diterima setiap tahunnya.

4.3. Coding dan Tema

Coding dalam wawancara sebagai tahapan untuk mendapatkan gambaran atas fakta sebagai proses analisis untuk jenis data penelitian kualitatif dengan mampu mengumpulkan serta menarik sejumlah kesimpulan terhadap data yang diperoleh. Langkah ini melibatkan beberapa tahapan seperti mengambil data tulisan yang telah dikumpulkan selama proses wawancara yang berhubungan dengan hasil rekomendasi IDM, mendeskripsikan kegiatan dan tema, menyajikan kembali deskripsi data dan tema-tema yang telah dibuat, serta penarikan kesimpulan. Berikut ini bentuk *coding* dan tema hasil wawancara yang diolah oleh peneliti.

Tabel 4.6 Coding dan Tema

Coding	Tema
<p>Indeks Desa Membangun: Indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan lingkungan yang berisi data capaian pembangunan setiap tahunnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Indeks Ketahanan Sosial</u> 1. <u>Dimensi Kesehatan</u> <ol style="list-style-type: none"> a) Ketersediaan tenaga kesehatan (Bidan, Dokter, Nakes dll) b) Penanganan stunting dan pemberian makanan bergizi c) Tingkat kepesertaan BPJS di Desa Binusan 2. <u>Dimensi Pendidikan</u> <ol style="list-style-type: none"> a) Akses Pendidikan dasar-menengah yang ada di Desa Binusan b) Alokasi bangunan sekolah c) Akses Pendidikan SMA/SMK/MA < 6 km d) Kegiatan PKBM/Paket A-B-C e) Kegiatan kursus 3. <u>Dimensi Modal Sosial:</u> <ol style="list-style-type: none"> a) Kebiasaan gotong royong bagi masyarakat 	<p style="text-align: center;">Capaian Prioritas pada Aspek Sosial</p>

Coding	Tema
Desa Binusan b) Terdapat keterbukaan ruang public untuk warga Desa Binusan c) Terdapat kegiatan dan kelompok olahraga Desa Binusan	
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Indeks Ketahanan Ekonomi</u> 1. <u>Dimensi Perdagangan</u> <ul style="list-style-type: none"> a) Akses penduduk ke pusat perdagangan (pertokoan, pasar permanen) b) Terdapat pasar desa 2. <u>Dimensi Akses Kredit</u> <ul style="list-style-type: none"> a) Tersedianya Lembaga perbankan umum dan BPR b) Akses masyarakat ke kredit 3. <u>Dimensi Lembaga Ekonomi</u> <ul style="list-style-type: none"> a) Tersedianya Lembaga ekonomi rakyat koperasi/Bumdes 	Capaian Prioritas pada Aspek Ekonomi
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Indeks Ketahanan Lingkungan</u> 1. <u>Dimensi potensi dan tanggap bencana</u> <ul style="list-style-type: none"> a) Kejadian bencana alam di desa b) Upaya terhadap potensi bencana alam di Desa 	Capaian Prioritas pada Aspek Lingkungan

Sumber: Data Diolah, 2023

Setelah menganalisis dan menentukan tema informasi dengan *coding* data, maka selanjutnya yaitu penyajian Kembali deskripsi dan tema yang telah dibuat dari proses *coding*, kemudian di jelaskan secara deskriptif dan di gambarkan secara spesifik tentang informasi yang telah didapatkan. Hasil analisis disajikan sebagai berikut.

4.4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Indeks Desa Membangun (IDM) di Desa Binusan

Untuk proses penganggaran APBDes di Desa Binusan setelah RKP Desa ditetapkan, langkah selanjutnya dalam proses penganggaran adalah penyusunan APBDes oleh Pemerintah Desa Binusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Kepala Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Desa.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Kepala Desa Desa Binusan yaitu Bapak RH terkait proses penyusunan APBDes, yang berperan dalam penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes:

Pemerintah Desa Binusan menyediakan/menyiapkan musyawarah desa terkait penyusunan anggaran. Pemerintah desa Binusan, BPD Desa Binusan, ketua RT, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, PKK, Kader Posyandu dan lain-lain yang bersangkutan dengan pemerintah Desa Binusan. Yang terlibat dalam pertanggungjawaban itu tentunya kepala desa dan perangkat desa yang diawasi oleh BPD Desa Binusan.

Dalam hal ini Pemerintah Desa Binusan telah melakukan Proses Penyusunan Anggaran telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan melalui Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang diubah dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa Binusan melakukan musyawarah kepada pihak-pihak terkait yang mewakili masyarakat desa dalam menyampaikan hal yang menjadi kebutuhan masyarakat demi kemajuan desa. Serta disini juga

dikatakan bahwa Kepala Desa sebagai penanggungjawab keuangan desa dibantu oleh perangkat desa dan diawasi oleh BPD. Sekertaris sebagai Koordinator keuangan seperti yang dikatakan oleh sekertaris Desa Binusan Bapak AD dalam wawancara:

Saya selaku sekdes merupakan salah satu verifikasi tentang keuangan desa jadi terkait dengan keuangan desa untuk hal-hal pembangunan dan lain sebagainya itu akan di verifikasi pada saya seperti itu. Jadi apabila sesuai dengan susunan APBDes maka akan di setujui tetapi apabila tidak sesuai dengan APBDes akan ditolak.

Dan kebijakan ini telah terlaksana dengan baik seperti yang telah disampaikan oleh Sekertaris Desa bapak AD untuk mempertegas bahwa kebijakan terkait mengelola keuangan desa telah terlaksana dengan baik dan sudah, sesuai dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis di Kantor Desa Binusan:

Untuk kebijakan seperti itu terkait aturan alhamdulillah telah terlaksana dengan baik sesuai dengan aturannya, saya selaku verifikasi di sini selalu memantau apakah ini benar seperti yang telah tertuang dalam aturan dimana mengelola keuangan desa itu. Jadi ini sudah sesuai juga, dan mudah-mudahan tidak terjadi kesalahan.

Dalam hal ini pemerintah Desa Binusan telah melaksanakan kebijakan mengelola keuangan seperti yang telah tertuang dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sekertaris desa selaku verifikasi telah melakukan pemantauan terkait hal ini sehingga dapat dipastikan telah terlaksana dengan baik dan sesuai.

Pada Desa Binusan dalam hal mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDes, dalam wawancara yang dilakukan penulis kepada Kepala Desa bapak RH:

Mengkoordinasikan penyusunan melalui undangan. Mengundang semua yang terkait dalam penyusunan anggaran seperti BPD, ketua RT, PKK, Kader Posyandu, LPM dan lain-lain. Yang diundang untuk melaksanakan musyawarah penyusunan anggaran dan diambil yang betul-betul prioritas untuk pembangunan di Desa Binusan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan Penulis terlihat keterlibatan wakil-wakil warga desa pada proses penyusunan anggaran serta memilih-milih hal-hal yang menjadi prioritas dalam proses pembangunan seperti yang tertuang dalam RKP-Desa bahwa Desa Binusan diharapkan dapat dengan efektif dalam menanggulangi berbagai permasalahan yang timbul dimasyarakat. Sehingga hal ini lah yang menjadi prioritas dan menjadi tanggungjawab pemerintah Desa Binusan demi kesejahteraan masyarakat desa, dengan memanfaatkan anggaran dengan sebaik-baiknya.

Pemerintah Desa Binusan telah Menyusun Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau yang disingkat dengan APBDes dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, yaitu 2020 sampai dengan 2022. Berikut ini Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Binusan Kabupaten Nunukan.

Tabel 4.7 Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Binusan Tahun Anggaran 2020

Kode Rek	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1	Pendapatan Asli Desa	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp -
4.1.1	Hasil Usaha Desa	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp -
4.2	Pendapatan Transfer	Rp3.703.580.946	Rp3.461.729.793	Rp 241.851.153
	Dana Desa	Rp2.603.371.000	Rp2.603.371.000	0
	Alokasi Dana Desa	Rp1.100.209.946	Rp 858.358.793	Rp 241.851.153

Kode Rek	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)
1	2	3	4	5
4.3	Pendapatan Lain-lain	Rp -	Rp 339.215	-Rp 339.215
4.3.6	Bunga Bank	Rp -	Rp 339.215	-Rp 339.215
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp3.709.580.946	Rp 3.468.069.008	Rp 241.511.938
5.	BELANJA			
5.1	Belanja Pegawai	Rp 340.300.000	Rp 271.500.000	Rp 68.800.000
	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp 62.500.000	Rp 49.000.000	Rp 13.500.000
	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp 189.000.000	Rp 148.500.000	Rp 40.500.000
	Tunjangan Pegawai	Rp 88.800.000	Rp 74.000.000	Rp 14.800.000
5.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 1.339.106.296	Rp 1.151.247.667	Rp 187.858.629
	Belanja Barang Perlengkapan	Rp 282.311.296	Rp 268.701.296	Rp 13.610.000
	Belanja Jasa Honorarium	Rp 697.945.000	Rp 585.680.000	Rp 112.265.000
	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 20.600.000	Rp 14.207.000	Rp 6.393.000
	Belanja Jasa Sewa	Rp 13.100.000	Rp 8.390.000	Rp 4.710.000
	Belanja Operasional Perkantoran	Rp 217.000.000	Rp 169.090.847	Rp 47.909.153
	Belanja Pemeliharaan	Rp 9.200.000	Rp 7.000.000	Rp 2.200.000
	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan Kepada	Rp 98.950.000	Rp 98.178.524	Rp 771.476
5.3	Belanja Modal	Rp1.481.667.826	Rp1.459.638.826	Rp 22.029.000
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat	Rp 72.230.000	Rp 50.201.000	Rp 22.029.000
	Belanja Modal Kendaraan	Rp 2.700.000	Rp 2.700.000	Rp -
	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	Rp 219.188.000	Rp 219.188.000	Rp -
	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	Rp 906.599.826	Rp 906.599.826	Rp -
	Belanja Modal Jembatan	Rp 198.000.000	Rp 198.000.000	Rp -
	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/	Rp 72.700.000	Rp 72.700.000	Rp -
	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	Rp -
	Belanja Modal Lainnya	Rp 6.250.000	Rp 6.250.000	Rp -
5.4	Belanja Tidak Terduga	Rp 648.000.000	Rp 648.000.000	Rp -
	Belanja Tidak Terduga	Rp 648.000.000	Rp 648.000.000	Rp -
	JUMLAH BELANJA	Rp3.809.074.122	Rp3.530.386.493	Rp 278.687.629
	SURPLUS/DEFISIT	-Rp 99.493.176	-Rp 62.317.485	-Rp 37.175.691
6.	PEMBIAYAAN			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	Rp 99.493.176	Rp 99.493.176	0
	SILPA Tahun Sebelumnya	Rp 99.493.176	Rp 99.493.176	0
	PEMBIAYAAN NETTO	Rp 99.493.176	Rp 99.493.176	0
	SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	Rp -	Rp 37.175.691	-Rp 37.175.691

Sumber: Laporan APBDes Desa Binusan, 2020

**Tabel 4.8 Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDes) Desa Binusan Tahun Anggaran 2021**

Kode Rek		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
		Pendapatan Transfer	Rp 4.272.593.516	Rp 4.167.407.903	Rp 105.185.613
		Dana Desa	Rp 3.264.846.000	Rp 3.264.846.000	0
		Alokasi Dana Desa	Rp 1.007.747.516	Rp 902.561.903	Rp 105.185.613
		JUMLAH PENDAPATAN	Rp 4.272.593.516	Rp 4.167.407.903	Rp 105.185.613
	5.	BELANJA			
1		BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 1.103.041.121	Rp 949.144.900	Rp 153.896.221
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	Rp 999.331.516	Rp 858.675.000	Rp 140.656.516
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Rp 6.616.000	Rp 6.616.000	0
1.3		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil	Rp 68.575.900	Rp 67.075.900	Rp 1.500.000
1.4		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan	Rp 28.517.705	Rp 16.778.000	Rp 11.739.705
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	Rp 1.836.053.791	Rp 1.832.211.656	Rp 3.842.135
2.1		Sub Bidang Pendidikan	Rp 202.000.000	Rp 202.000.000	Rp -
2.2		Sub Bidang Kesehatan	Rp 374.556.350	Rp 370.724.215	Rp 3.832.135
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp 538.570.800	Rp 538.570.799	Rp 1
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp 52.000.000	Rp 52.000.000	0
2.7		Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	0
2.8		Sub Bidang Pariwisata	Rp 664.926.641	Rp 664.916.642	Rp 9.999
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	Rp 605.807.294	Rp 594.517.234	Rp 11.290.060
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan	Rp 177.000.000	Rp 176.999.940	Rp 60

Kode Rek		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)
1	2	3	4	5	6
		Masyarakat			
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Rp 265.222.294	Rp 265.222.294	Rp 0
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Rp 11.865.000	Rp 10.715.000	Rp 1.150.000
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Rp 151.720.000	Rp 141.580.000	Rp 10.140.000
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Rp 13.879.000	0	Rp 13.879.000
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Rp 13.879.000	0	Rp 13.879.000
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK	Rp 650.988.000	Rp 650.988.000	0
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	Rp 650.988.000	Rp 650.988.000	Rp -
		JUMLAH BELANJA	Rp 4.209.769.206	Rp 4.026.861.790	Rp 182.907.416
		SURPLUS/DEFISIT	Rp 62.824.310	Rp 140.546.113	(Rp 77.721.803)
6.		PEMBIAYAAN			
6.1		Penerimaan Pembiayaan	Rp 37.175.690	Rp 37.175.690	0
		SILPA Tahun Sebelumnya	Rp 37.175.690	Rp 37.175.690	0
6.2		Pengeluaran Pembiayaan	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	0
		Penyertaan Modal Desa	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	0
		JUMLAH PEMBIAYAAN	(Rp 62.824.310)	(Rp 62.824.310)	0
		SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	Rp -	Rp 77.721.803	Rp 77.721.803

Sumber: Laporan APBDes Desa Binusan, 2021

Tabel 4.9 Laporan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Binusan Tahun Anggaran 2022

Kode Rek	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3
4.	PENDAPATAN	
4.1	Pendapatan Asli Desa	Rp 9.550.000
4.1.1	Hasil Pungutan Desa	Rp 9.550.000
4.2	Pendapatan Transfer	Rp 2.444.541.612
	Dana Desa	Rp 1.479.771.000

Kode Rek	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3
	Alokasi Dana Desa	Rp 964.770.612
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 2.454.091.612
5.	BELANJA	
5.1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 1.024.981.514
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	Rp 1.001.397.809
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Rp 6.616.000
	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan	Rp 16.967.705
5.2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	Rp 536.326.195
	Sub Bidang Pendidikan	Rp 97.000.000
	Sub Bidang Kesehatan	Rp 235.254.800
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp 191.571.395
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp 12.500.000
5.3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	Rp 175.928.000
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Rp 47.000.000
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Rp 128.928.000
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Rp 200.000.000
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	Rp 200.000.000
5.4	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK	Rp 594.000.000
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Rp 594.000.000
	JUMLAH BELANJA	Rp 2.531.235.709
	SURPLUS/DEFISIT	-Rp 77.144.097
6.	PEMBIAYAAN	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	Rp 77.144.098
	SILPA Tahun Sebelumnya	Rp 77.144.098
	PEMBIAYAAN NETTO	Rp 77.144.098
	SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	Rp S 1

Sumber: Laporan APBDes Desa Binusan, 2022

Pada Tabel 4.7, Tabel 4.8 dan Tabel 4.9 dapat dilihat laporan APBDes Desa Binusan dalam 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2020,2021 dan 2022. Dari penjabaran tersebut dapat dilihat dari perencanaan anggaran bahwa aspek-aspek yang terdapat dalam Indeks Desa Membangun telah tercantum dalam Laporan

APBDes Desa Binusan. Pada anggaran tahun 2020, anggaran untuk aspek sosial yaitu sebesar Rp 1.317.352.000, pada aspek ekonomi Rp 1.243.887.826 dan pada aspek lingkungan Rp 30.000.000. pada anggaran tahun 2021, anggaran untuk aspek sosial yaitu Rp 1.238.363.644, pada aspek ekonomi Rp 1.217.376.441 dan pada aspek lingkungan Rp 650.988.000. Anggaran tahun 2022, anggaran untuk aspek sosial Rp 520.682.800, anggaran untuk aspek ekonomi Rp 391.571.395 dan anggaran pada aspek lingkungan Rp 594.000.000. Dari keseluruhan anggaran yang ada diperuntukan untuk kemajuan desa serta meningkatkan status desa yang terdapat pada Indeks Desa membangun.

Setelah dilakukannya penyusunan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pemerintah Desa Binusan melakukan Pengelolaan atas APBDes. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Desa Binusan bapak RH dalam wawancara:

Proses pengelolaan APBDes di Desa Binusan itu, setelah tersusunnya anggaran dan kita menjadikan peraturan kepala desa sebagai APBDes sesuai dengan hasil musyawarah dan anggaran yang ditetapkan dari pemerintah pusat sesuai dengan musyawarah kita akan menjalankan APBDes kita yang telah disepakati dan yang telah kita musyawahkan bersama-sama seperti jalan tani atau jalan umum untuk masyarakat itu yang kita laksanakan

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis Pemerintah Desa telah melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan yaitu, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menjadi Peraturan Desa. Serta diketahui juga dari hasil wawancara ini Pemerintah Desa Binusan melakukan Pembangunan jalan umum dan jalan tani

untuk kepentingan masyarakat sebagaimana yang terdapat dalam RKP-Desa Desa Binusan .

Terkait dengan pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa memiliki tahapan dalam menetapkan APBDes dalam hal Pembangunan Desa. Seperti yang diketahui dalam wawancara yang dilakukan peneliti di Kantor Desa Binusan kepada Kepala Desa bapak RH:

Dalam menetapkan APBDes tahap-tahapannya yaitu yang pertama dari warga, organisasi seperti mengajukan proposal dan juga nanti akan musyawarakan lagi untuk penganggaran APBDes di Desa Binusan, di saring lagi mana yang lebih prioritas sehingga bisa disetujui oleh semua perangkat desa, BPD dan juga RT dan lain sebagainya yang terlibat dalam pembangunan di Desa Binusan.

Dari penyampaian Bapak RH di atas bahwa dalam melakukan pengelolaan keuangan pihak Desa Binusan melalui beberapa tahapan yang dilakukan yaitu pengajuan proposal melakukan musyawarah, sehingga dari hasil wawancara diambil lagi yang sangat prioritas lalu disetujui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan di Desa Binusan.

Rekomendasi hasil IDM yang dikeluarkan oleh Kemedesa Desa Binusan dalam 3 (tiga) tahun selalu mengalami kenaikan pada skor nilai IDM. Dalam hal ini ada kaitannya dengan proses penyusunan anggaran Desa Binusan yang tepat sasaran sehingga hal ini dapat tercapai. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak RH:

Penyusunan anggaran untuk peningkatan IDM setiap tahunnya yaitu kita coba berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Kesehatan, sosial, kecamatan dan juga dinas pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten terkait bagaimana kita mengelola desa agar bisa meningkatkan serta kita juga diberikan petunjuk-petunjuk untuk mengatasi masalah-masalah yang

ada di Desa dan juga bagaimana bisa meningkatkan program tersebut sehingga mengalami peningkatan.

Perangkat Desa Binusan dalam melakukan proses penyusunan anggaran untuk peningkatan pada Indeks Desa Membangun yaitu melakukan koordinasi kepada pihak-pihak Kesehatan, sosial dan juga Dinas pemberdayaan masyarakat Desa. Dari ini dapat dilihat pihak Desa Binusan telah melakukannya dengan pihak-pihak yang erat hubungannya dengan aspek-aspek yang terdapat pada Indeks Desa Membangun yaitu aspek sosial, ekonomi dan ekologi/lingkungan dalam mengatasi masalah-masalah atau yang menjadi rekomendasi yang terdapat dalam Hasil Rekomendasi IDM untuk Desa Binusan.

Dalam melakukan penyusunan anggaran Desa Binusan juga mengalami beberapa masalah, seperti yang disampaikan oleh Bapak RH dalam wawancara:

Penyusunan anggaran itu masalahnya banyak pertama yaitu pasti dari masyarakat itu minta berbagai macam pembangunan dan juga setiap RT mengaju musyawarah terkait anggaran. Disitu masalahnya yang kita hadapi karena tidak sesuai dengan anggaran yang masuk dengan permintaan dari masyarakat, itu permasalahannya.

Berdasarkan dari penyampain Kepala Desa di atas bahwa pihak Desa Binusan juga dihadapkan oleh masalah-masalah pada saat proses penyusunan anggaran desa, baik itu dari masyarakat yang menginginkan pemerataan pembangunan dan juga dari pihak Rukun Tetangga yang diketahui Desa Binusan memiliki 15 RT setiap dari pihak-pihak ini memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Sehingga, hal ini yang menjadi masalah bagi pihak Perangkat Desa dalam proses penyusunan anggaran dikarenakan jumlah anggaran yang masuk dengan

permintaan masyarakat tidak seimbang, maka dari itu sangat sulit bagi Perangkat Desa untuk melakukan pemerataan pembangunan dengan jumlah anggaran yang diterima dan luas wilayah Desa Binusan.

Desa Binusan juga selama 3 (tiga) tahun yang menjadi rekomendasi super prioritas seperti yang terdapat pada hasil rekomendasi IDM dari Kemendes. Dari hal ini kepala desa Desa Binusan memberikan alasan bahwa:

Kendala kita di sini Kembali ke anggaran, karena kita tergolong di Desa yang cukup luas dan juga masyarakatnya kurang lebih lima ribu orang dengan luas wilayah sekitar 99 ribu hektar dengan anggaran yang seperti itu sangat terbatas untuk pembangunan dan juga pemerataan pembangunan di desa Binusan.

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa anggaran sangat penting untuk melakukan pemerataan pembangunan di Desa Binusan. Dengan wilayah yang cukup luas dan memiliki banyak warga, sehingga dengan anggaran yang sangat terbatas tersebut sangat-sangat tidak memungkinkan untuk pembangunan yang merata untuk seluruh wilayah Desa.

4.4.1. Capaian Prioritas pada Aspek Sosial

Sesuai dengan hasil rekomendasi IDM Desa Binusan, terdapat beberapa rekomendasi prioritas maupun super prioritas yang ada pada desa Binusan. Disini pada indeks komposit sosial yang memiliki beberapa dimensi yang pertama pada dimensi kesehatan dapat dilihat pada hasil rekomendasi bahwa setiap indikator yang ada telah teralokasikan semua sudah tidak ada yang menjadi rekomendasi lagi baik itu prioritas maupun super proiritas. Berdasarkan APBDes Desa Binusan dalam tiga tahun terakhir telah mengalokasikan anggran yang cukup besar untuk

bagian kesehatan. Desa Binusan juga sudah memiliki tenaga kesehatan, sebagaimana dalam hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala Desa bapak RH, bahwa:

Untuk tenaga kesehatan yang ada di Desa terdapat beberapa tenaga kesehatan ada dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi dan perawat ada yang sudah menjadi pns dan yang non PNS juga

Dalam wawancara yang dilakukan dapat dilihat bahwa Desa Binusan telah memiliki tenaga kesehatan yang dapat membantu dalam hal menangani kesehatan warga desa. Sebagaimana yang merupakan salah satu indikator dalam bidang kesehatan yang terdapat dalam rekomendasi indeks desa membangun dan Desa Binusan memenuhi standar ini.

Lama waktu yang dibutuhkan bagi warga desa untuk akses jalan menuju rumah sakit atau puskesmas juga penting dalam hal kemajuan suatu desa. Sehingga, dalam hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak RH terkait akses menuju rumah sakit dan puskesmas, Beliau menyatakan bahwa “ *Jarak tempuhnya kurang lebih 15 menit, untuk ke rumah sakit dan puskesmas*”. Dari pernyataan Bapak RH di atas dapat diketahui bahwa jarak tempuh yang diperlukan masyarakat desa untuk ke rumah sakit dan puskesmas yaitu membutuhkan waktu kurang lebih hanya 15 menit.

Untuk tingkat kepesertaan BPJS juga menjadi hal yang penting dan menjadi salah satu rekomendasi yang diperlukan. Untuk Desa Binusan sebagaimana dalam hasil wawancara Bapak RH menyatakan “*Kepesertaan BPJS di Desa Binusan ini sudah 80% warga desa menjadi peserta BPJS*”. Dari hasil wawancara tersebut

dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Binusan sebagian besar telah menjadi kepesertaan BPJS yang diperuntukan untuk warga desa. Sehingga dapat mempermudah pada saat ingin berobat, dan ini merupakan program pemerintah desa yang di tanggung oleh pemerintah desa.

Salah satu yang menjadi rekomendasi dalam bidang kesehatan dan menjadi program yang sedang dijalankan oleh pihak desa adalah penekanan data stunting yang ada di Desa Binusan. Dengan menyediakan makan/minum yang diperuntukkan untuk anak-anak yang mengalami stunting dan berada di Desa Binusan.

Kedua terdapat dimensi Pendidikan pada indeks komposit sosial. Pada hasil rekomendasi indeks desa membangun yang menjadi rekomendasi untuk Desa Binusan yaitu pada akses Pendidikan SMA/SMK/MA < 6 km, kegiatan PKBM/Paket A-B-C dan kegiatan kursus. Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara yang dilakukan kepada Kepala Desa dan Sekertaris Desa untuk mendapatkan pernyataan yang dapat menjawab tujuan penelitian ini. Sehingga, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan pada bidang Pendidikan ini.

Akses Pendidikan dasar dan menengah yang dilalui oleh masyarakat desa juga menjadi hal yang menjadi salah satu standar dalam mencapai desa maju dan mandiri. Diketahui Akses Pendidikan dasar, Pendidikan menengah dan Pendidikan SMA pada Desa Binusan dalam wawancara yang dilakukan kepada Bapak RH bahwa:

Akses ke pendidikan dasar dan pendidikan menengah sendiri sudah cukup efisien. Akses ke pendidikan ini mudah untuk di jangkau dan sudah merata untuk jarak-jarak tempuhnya juga memiliki jarak tempuh kurang dari 15 menit. Tetapi lain halnya dengan Pendidikan SMA ini soalnya di Desa Binusan ini belum terdapat SMA yang ada di lingkungan/wilayah Desa Binusan jadi anak-anak yang sudah lulus Pendidikan menengah lebih memilih untuk melanjutkan pendidikannya ke SMA itu yang berada jauh dari wilayah Desa yaitu kurang lebih memakan waktu 30 menit karena sangat jauh dari sini.

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa jarak tempuh yang ada di Desa Binusan sudah cukup efisien, karena memiliki jarak dan jalan yang dapat dilalui merupakan jalan yang dapat di jangkau dan tidak memiliki jarak tempuh yang jauh dari lingkungan masyarakat desa yang ada di Desa Binusan dan memiliki jarak tempuh yang hanya dapat di tempuh kurang dari 15 menit. Dapat dilihat juga untuk Pendidikan SMA sendiri belum terdapat di Desa Binusan, sehingga anak-anak yang telah menempuh Pendidikan menengah lebih memilih melanjutkan Pendidikan SMA ke tempat yang lebih jauh dan bukan merupakan wilayah dari Desa Binusan, serta memiliki jarak tempuh yang sangat jauh yaitu memakan waktu 30 menit untuk pergi ke Pendidikan SMA ini.

Berkaitan dengan alokasi bangunan terhadap sekolah-sekolah yang dilakukan oleh pihak desa yang menjadi rekomendasi. Dalam hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak RH yang menyatakan:

Alokasi bangunan sekolah-sekolah yang dilakukan pihak desa yaitu pada pembangunan bangunan untuk PAUD. Membangun tiga bangunan di beberapa RT ada RT 03, RT 07 sama RT 13 dan kami dari pihak desa juga memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan demi kelancaran proses ajar-mengajar di sekolah-sekolah tersebut.

Dan dipertegas juga oleh Bapak AD selaku sekretaris desa terkait hal ini bahwa *“Kalo untuk pembangunan-pembangunan sekolah di Desa Binusan pihak desa telah melakukan beberapa pembangunan bangunan untuk sekolah PAUD gitu di beberapa wilayah Desa”*. Dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Bapak RH dan AD bahwa pihak desa telah mengalokasikan sebagian anggaran yang diperuntukkan untuk pembangunan sekolah-sekolah yang ada di desa Binusan yaitu dengan membangun beberapa bangunan untuk sekolah PAUD yang untuk perkembangan anak-anak usia dini di Desa Binusan dan pihak desa juga memfasilitasi semua kebutuhan yang diperlukan untuk kelancaran ajar mengajar di sekolah tersebut.

Satu lagi yang menjadi rekomendasi untuk Desa Binusan yaitu mengenai kegiatan PKBM/Paket A-B-C dan kegiatan kursus. Dalam wawancara yang dilakukan kepada Bapak RH beliau menyatakan:

Kegiatan PKBM dan kegiatan kursus tidak terdapat di Desa Binusan. Tidak mengadakan PKBM/Paket A-B-C ini di Desa kita di sini hanya mengadakan PAUD dan sekolah Luar Biasa. Untuk kegiatan kursus ini juga kalo sekarang belum di adakan tapi sempat pernah ada di desa, tapi untuk saat ini sudah tidak ada karena kurangnya minat atau kesadaran warga untuk melakukan kegiatan ini.

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa Desa Binusan tidak mengadakan PKBM/Paket A-B-C, Desa Binusan hanya mempunyai sekolah yang berupa PAUD dan Sekolah Luar Biasa yang diperuntukkan untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di Desa Binusan. Sedangkan untuk kegiatan kursus di Desa Binusan pernah terdapat akan tetapi untuk sekarang sudah tidak terdapat

lagi dikarenakan kurangnya minat dan kesadaran bagi warga desa dalam meningkatkan keterampilan yang dimiliki.

Kegiatan gotong royong yang dilakukan dilingkungan Desa Binusan seperti dalam penyampaian pada wawancara yang disampaikan oleh kepala desa Bapak RH mengenai hal ini:

Kegiatan gotong royong di Desa Binusan sendiri masih sering dilakukan pada saat akan dilaksanakan acara-acara besar atau kegiatan adat yang akan dilakukan oleh desa, warga melakukan kerja bakti secara bersama-sama.

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Bapak RH bahwa masyarakat Desa Binusan sering melakukan kegiatan gotong royong, seperti pada saat akan dilaksakannya acara-acara besar yang akan dilakukan di Desa Binusan dan juga pada saat akan adanya kegiatan-kegiatan adat yang akan dilaksanakan di balai adat yang di desa, hal ini juga dapat meningkatkan rasa kebersamaan yang dimiliki oleh masyarakat desa pada saat melakukan pekerjaan secara bersama-sama.

Keterbukaan ruang publik yang diperuntukan untuk warga desa merupakan salah satu indikator kegiatan modal sosial pada rekomendasi indeks desa membangun di Desa Binusan. Ruang publik menjadi salah satu fasilitas bagi masyarakat untuk dapat berkumpul dan beraktivitas bersama-sama. Adanya ruang publik menjadikan kegiatan sosial masyarakat desa lebih aktif serta mendukung pelaksanaan pembangunan desa. Untuk Desa Binusan sendiri telah tersedia beberapa ruang publik yang disediakan oleh desa, sebagaimana yang telah disampaikan oleh bapak RH terkait hal ini:

Kalo keterbukaan ruang publik desa Binusan juga sudah menyediakan yaitu ada lapangan bola, lapangan bulu tangkis dan lapangan voli. Untuk lokasinya sendiri sudah ada di beberapa tempat di desa soalnya desa nih kan luas jadi kita bangunnya di beberapa titik biar pembangunannya bisa merata sehingga, biasa di gunakan warga desa untuk berkumpul dalam melakukan kegiatan atau acara-acara besar yang diselenggarakan oleh desa.

Fasilitas ruang publik di Desa Binusan sudah tersedia yaitu berupa lapangan bola, lapangan badminton dan lapangan voli. Disebutkan juga oleh bapak RH untuk lokasi pembangunan yang dilakukan oleh pihak desa yaitu dibangun di beberapa tempat agar semua masyarakat desa dapat menikmati serta pembangunan di wilayah Desa Binusan dapat merata. Yang dipergunakan oleh masyarakat desa untuk tempat berkumpul serta juga di gunakan apabila sedang ada acara-acara besar yang diselenggarakan oleh desa.

4.4.2. Capaian Prioritas pada Aspek Ekonomi

Diketahui juga dalam Hasil Rekomendasi IDM yang dikeluarkan oleh Kemendes, dapat dilihat beberapa rekomendasi prioritas maupun super prioritas yang ada pada Desa Binusan. Dalam hal rekomendasi ini penulis mengajukan beberapa pertanyaan wawancara kepada Kepala Desa Desa Binusan yaitu Bapak RH yang dilakukan di kantor Desa Binusan. Pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan program rekomendasi IDM pada aspek ekonomi, dikarenakan dari semua aspek rekomendasi yang terdapat pada Indeks Desa Membangun Desa Binusan dalam aspek ekonomi terdapat lebih banyak yang menjadi rekomendasi bagi Desa Binusan. Sehingga dalam hal ini peneliti ingin mengetahui bagaimana Pemerintah Desa dalam mengalokasikan anggarannya pada bagian ekonomi.

Berkaitan dengan ketersediaan pusat perdagangan seperti akses penduduk ke pertokoan, pasar permanen dan pasar desa untuk keperluan masyarakat Desa Binusan. Dalam wawancara yang dilakukan kepada Kepala Desa, beliau menyatakan terkait hal tersebut:

Untuk akses disini sangat luas jadi sangat tidak rata, karena ada sebagian yang dekat dengan pusat perbelanjaan ada sebagian yang jauh jadi istilahnya kalo dibilang mencukupi sangat tidak adil karena yang lainnya juga perlu tapi kondisi di desa Binusan sangat luas dan pembangunannya juga belum sangat merata jadi sebagian dari warga kita menagalami ke susahan apa lagi lokasi jauh dari pusat perbelanjaan apa lagi di sini belum terdapat pasar permanen jadi sebagian warga itu menyetok kebutuhan sehari-hari untuk beberapa hari kedepan dikarenakan jauhnya pusat perbelanjaan tersebut.

Dari pernyataan Kepala Desa di atas dapat dilihat bahwa untuk akses penduduk ke pusat perbelanjaan itu masih sangat tidak merata, dikarenakan luasnya wilayah Desa Binusan. Sehingga, warga ada yang dekat dengan pusat perbelanjaan dan ada juga yang jauh, warga yang memiliki tempat tinggal jauh dari pusat perbelanjaan dengan terpaksa melakukan penyetokan barang dalam kurun waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan diketahui juga di Desa Binusan ini belum tersedia Pasar Permanen yang dapat memudahkan warga dalam memenuhi kebutuhannya.

Pada Hasil Rekomendasi IDM terdapat indikator peritem yaitu berkaitan dengan akses distribusi logistik seperti adanya kantor pos dan jasa logistik. Pada indikator ini Desa Binusan tergolong mendapat rekomendasi super prioritas dengan persentase 0.60%. Sehingga dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada Bapak RH bahwa:

Untuk desa Binusan jasa logistik seperti pos dan lain-lain belum ada jadi belum terpenuhi, kalo untuk di desa kita tidak membangun pusat logistik seperti kantor pos dan lain-lain yang berkaitan, jadi di desa itu membangun seperti akses untuk meningkatkan jalan usaha tani dan lain-lain yang berhubungan dengan masyarakat langsung. Kalo untuk logistiknya kita belum pernah untuk pembangunan kantor pos dan lain-lain.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa Desa Binusan tidak ada pembangunan yang berkaitan dengan jasa logistik seperti pos dan lain-lain. Tetapi Desa Binusan membangun akses untuk meningkatkan jalan usaha tani dan lain-lain yang langsung berhubungan dengan masyarakat, agar memperlancar akses masyarakat dalam melakukan kegiatan.

Dalam aspek ekonomi juga terdapat akses kredit seperti tersediannya Lembaga perbankan umum, akses penduduk ke kredit dan Lembaga ekonomi rakyat (koperasi)/Bumdes. Dalam hal ini Desa Binusan juga mendapatkan rekomendasi super prioritas dari Hasil Rekomendasi IDM. Sehingga penulis melakukan wawancara terkait hal ini kepada Kepala Desa beliau menyatakan bahwa.

Untuk akses kredit di sini kita sudah punya akses kredit melalui bank umum. Kalo untuk koperasi dan Bumdes itu kita belum punya karena belum ada anggaran untuk kita menyediakan kredit.

Diketahui juga bahwa terdapat akses Kredit di Desa Binusan, yaitu melalui bank umum. Sedangkan untuk koperasi dan Bumdes itu sendiri belum tersedia di Desa Binusan, dikarenakan belum tersedianya anggaran yang diterima untuk menyediakan kredit yang dikelola oleh pihak Desa.

Terkait dengan kelancaran proses perekonomian di Desa Binusan, perlu dibuka area seperti angkutan umum, jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor roda empat dan kualitas jalan desa. Dilihat dari hasil rekomendasi IDM, ini juga mendapat rekomendasi super prioritas. Seperti yang dikatakan Mr. RH bahwa:

Adapun keterbukaan akses jalan angkutan umum, kembali seperti yang saya katakan tadi, bahwa desa Binusan sangat besar, yaitu setengah pulau Nunukan. Jika ada open access ke open access, itu sudah ada tapi belum memenuhi standar open access karena ada yang jauh, ada yang dekat, sangat tidak mungkin kondisinya, tapi beberapa warga juga punya open access, jadi open access ini sudah ada, masih belum sepenuhnya terpenuhi.

4.4.3. Capaian Prioritas pada Aspek Lingkungan

Pada hasil rekomendasi indeks desa membangun dapat diketahui bahwa pada aspek lingkungan Desa Binusan mendapat rekomendasi pada upaya/Tindakan terhadap potensi bencana alam. Sedangkan pada potensi rawan bencana sendiri di Desa Binusan tidak pernah terjadi bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan kebakaran hutan, sehingga pada indeks komposit lingkungan pada Desa Binusan termasuk baik. Upaya dan Tindakan yang telah dilakukan pemerintah desa untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat desa. Berkaitan dengan ini, pelaksanaan kegiatan program-program di Desa Binusan sempat mengalami kendala yang dikarenakan terjadinya pandemi covid-19 pada tahun 2020 sampai dengan 2021 yang mengharuskan semua aktivitas perkumpulan dihentikan.

Berhubungan dengan dampak yang dihadapi Desa Binusan dalam wawancara yang dilakukan kepada bapak RH bahwa pandemi covid-19 sangat berpengaruh

pada proses pembangunan yang sedang berjalan maupun yang sedang direncanakan oleh pihak desa:

Karena memprioritaskan covid-19, jadi anggaran dari pusat pun dikurangi untuk membiayai dana covid-19 yang terjadi di Indonesia. Sehingga di Desa selama tahun 2020 sampai dengan sekarang mengalami penurunan yang sangat signifikan

Dengan ini dapat dilihat bahwa berkurangnya anggaran yang diterima Desa Binusan merupakan dampak dari pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia beberapa tahun lalu. Dikarenakan anggaran dari pusat yang seharusnya diberikan kepada desa tetapi dialih fungsikan untuk membiayai berbagai hal yang terkena dampak pandemi Covid-19 ini, baik itu dari segi kesehatan hingga pada ekonomi masyarakat yang juga terdampak. Kejadian ini yang menjadi penyebab utama, sehingga desa mengalami hambatan pada biaya untuk melakukan perencanaan yang diperuntukkan untuk pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan pembinaan kemasayarakatan Desa.

Tabel 4.10 APB Desa dalam Capaian IDM (Rekomendasi IDM yang belum terlaksana)

Tahun	APB Des	Capaian IDM	Indeks Desa Membangun	Rekomendasi		Alasan belum terlaksana
				Super Prioritas (0,00% - 0,50%)	Prioritas (0,50% - 0,75%)	
2020	Bidang Pemerintah Desa	0.7306 (Maju)	Indeks Ketahanan Sosial			Pada tahun 2020 masih terdapat beberapa program indeks desa membangun yang belum terlaksana yaitu pada indeks ketahanan sosial ada Akses Pendidikan SMA/SMK/MA < 6 KM, Kegiatan PKBM/Paket A-B-C, kegiatan kursus. Masih belum terprogramnya akses Pendidikan SMA yaitu karena SMA merupakan sekolah yang di bawah naungan pemerintah provinsi sehingga Anggaran desa yang ada tidak diperuntukkan untuk membangun akses Pendidikan SMA. Untuk kegiatan PKBM dan kursus di Desa Binusan telah ada diprogramkan akan tetapi karena kurangnya minat dan kesadaran warga maka sudah tidak terlaksana lagi kegiatan ini. Pada indeks ketahanan ekonomi ada Terdapat kantor pos dan jasa logistik, Tersedianya lembaga perbankan umum dan BPR, Akses penduduk ke kredit, Tersedianya lembaga ekonomi rakyat (koperasi)/bumdes, Terdapat moda (angkutan umum, trayek reguler dan jam operasi). Untuk akses ke kredit pihak desa Binusan melalui kredit bank umum, tetapi untuk yang di kelola sendiri oleh desa belum ada karena belum tersedianya anggaran yang diterima untuk menyediakan kredit, Kantor Pos dan Jasa Logistik, Tersedianya Lembaga Perbankan Umum dan BPR, Tersedianya Lembaga Ekonomi Rakyat (Koperasi)/Bumdes, Terdapat Usaha Kedai makanan, Restoran, Hotel dan Penginapan, Terdapat Moda (Angkutan Umum, Trayek Reguler dan Jam Operasi), Jalan yang Dapat Dilalui oleh Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih. masih belum ada di Desa
	1.190.880.796		Jarak ke sarana kesehatan terdekat			
	Bidang Pembangunan Desa		ketersediaan tenaga kesehatan (Bidan, Dokter dan Nakes)			
	2.145.082.826		akses ke poskesdes, polindes atau posyandu			
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		Tingkat aktivitas posyandu			
	434.417.500		tingkat Kepesertaan BPJS			
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		Akses Pendidikan Dasar SD/MI < 3 KM			
19.500.00	Akses Pendidikan SMP/MTs < 6 KM					
	Akses Pendidikan SMA/SMK/MA < 6 KM		0.20			

Tahun	APB Des	Capaian IDM	Indeks Desa Membangun	Rekomendasi		Alasan belum terlaksana
				Super Prioritas (0,00% - 0,50%)	Prioritas (0,50% - 0,75%)	
	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak		Kegiatan PAUD			<p>Binusan dikarenakan pemerintah desa tidak dapat melaksanakannya sendiri, perlu adanya bantuan dan kerja sama dengan pihak terkait untuk penerapan rekomendasi tersebut. Seperti Lembaga ekonomi diperlukannya kerja sama dengan masyarakat dan dana yang memadai agar dapat berjalan, kemudian akses distribusi dan keterbukaan wilayah perlunya bantuan dari kabupaten untuk penerapannya. Pada indeks ketahanan lingkungan terdapat upaya/Tindakan terhadap potensi bencana alam. Pada Desa Binusan potensi rawan bencana sendiri di Desa Binusan tidak pernah terjadi bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan kebakaran hutan, sehingga pada upaya/Tindakan terhadap potensi bencana alam pada Desa Binusan termasuk baik. Upaya dan Tindakan yang telah dilakukan pemerintah desa untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat desa. Berkaitan dengan ini, pelaksanaan kegiatan program-program di Desa Binusan sempat mengalami kendala yang dikarenakan terjadinya pandemi covid-19 pada tahun 2020 sampai dengan 2021 yang mengharuskan semua aktivitas perkumpulan dihentikan. Anggaran yang diperuntukkan pada setiap bidang penyelenggran telah terprogram dengan baik.</p>
	30.000.000		Kegiatan PKBM/Paket A-B-C	0.20		
			Kegiatan Kursus	0.20		
			Taman Bacaan Masyarakat atau Perpustakaan Desa			
			Kebiasaan Gotong Royong			
			Keterbukaan Ruang Publik			
			Terdapat Kelompok Olahraga			
			Keragaman Suku/Etnis di Desa			
			Bahasa Sehari-hari Warga Desa			
			Agama Mayoritas Warga Desa			
			Tersedianya Sarana Pos Kamling di Desa			
			Partisipasi Warga Siskamling			
			Kejadian Perkelahian Massal di desa			

Tahun	APB Des	Capaian IDM	Indeks Desa Membangun	Rekomendasi		Alasan belum terlaksana
				Super Prioritas (0,00% - 0,50%)	Prioritas (0,50% - 0,75%)	
			Terdapat Akses ke Sekolah Luar Biasa			
			Terdapat Penyandang Kesejahteraan Sosial (Anjal dan Pengemis)			
			Mayoritas Warga Memiliki Sumber Air layak Minum			
			Akses Warga Memiliki Air Mandi dan Mencuci			
			Mayoritas Warga Memiliki Jamban			
			Terdapat Tempat Pembuangan Sampah			
			Jumlah Keluarga yang telah memiliki aliran listrik			
			Warga Memiliki Telepon seluler dan Sinyal Kuat			
			Akses Internet di Kantor Desa			
			Terdapat Akses Internet untuk Warga			
			Indeks Ketahanan Ekonomi			

Tahun	APB Des	Capaian IDM	Indeks Desa Membangun	Rekomendasi		Alasan belum terlaksana
				Super Prioritas (0,00% - 0,50%)	Prioritas (0,50% - 0,75%)	
			Terdapat Lebih dari Satu Jenis Kegiatan Ekonomi Penduduk			
			Akses penduduk ke pusat perdagangan (pertokoan, pasar permanen)			
			Terdapat pasar desa			
			Terdapat Sektor Perdagangan (warung, Minimarket)			
			Terdapat kantor pos dan jasa logistik		0.60	
			Tersedianya lembaga pebankan umum dan BPR		0.60	
			Akses penduduk ke kredit	0.40		
			Tersedianya lembaga ekonomi rakyat (koperasi)/bumdes		0.60	
			Terdapat usaha kedai makanan, restoran, hotel dan penginapan		0.60	
			Terdapat moda (angkutan umum, trayek reguler dan jam operasi)		0.60	

Tahun	APB Des	Capaian IDM	Indeks Desa Membangun	Rekomendasi		Alasan belum terlaksana
				Super Prioritas (0,00% - 0,50%)	Prioritas (0,50% - 0,75%)	
			Jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih			
			Kualitas jalan desa			
			Indeks Ketahanan Lingkungan			
			Pencemaran air, tanah, dan udara			
	Total APB Des		Kejadian bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan)			
	3.819.881.122		Upaya/ tindakan terhadap potensi bencana alam	0.00		

Tahun	APB Des	Capaian IDM	Indeks Desa Membangun	Rekomendasi		Alasan belum terlaksana
				Super Prioritas (0,00% - 0,50%)	Prioritas (0,50% - 0,75%)	
			Indeks Ketahanan Sosial			Pada tahun 2021 anggaran yang diterima oleh desa Binusan mengalami kenaikan, sehingga pemerintah desa Binusan melakukan beberapa program pembangunan pada bidang Pendidikan yaitu membangun Gedung yang digunakan untuk PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah sebanyak 3 unit. Pada
2021	Bidang Pemerintah Desa	0.7751 (Maju)	Jarak ke sarana kesehatan terdekat			

Tahun	APB Des	Capaian IDM	Indeks Desa Membangun	Rekomendasi		Alasan belum terlaksana
				Super Prioritas (0,00% - 0,50%)	Prioritas (0,50% - 0,75%)	
	1.103.041.121		ketersediaan tenaga kesehatan (Bidan, Dokter dan Nakes)			bidang Kesehatan pemerintah desa Binusan juga memiliki program berupa penyelenggaraan pos Kesehatan Desa, posyandu, penyuluhan dan pelatihan, penyelenggaraan desa siaga Kesehatan serta pembangunan posyandu. Serta pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pemerintah Desa Binusan melakukan beberapa pembangunan jalan lingkungan pemukiman, jalan usaha tani dan jembatan, pembangunan sambungan air, pengelolaan hutan milik desa, penyelenggaraan informasi publik desa, pembuatan dan pengelolaan jaringan komunikasi dan informasi lokal desa serta pemerintah desa juga melakukan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata milik desa. Pada bidang penyelenggaraan pembangunan pemerintah Desa Binusan juga memprogramkan pengadaan pos keamanan desa, penyelenggaraan festival kesenian desa, pembangunan sarana prasarana kebudayaan milik desa, penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa, pembinaan Lembaga adat, pembinaan LKMD/LPM/LPMD, pembinaan PKK, dan pelatihan pembinaan Lembaga masyarakat. Bidang pemberdayaan masyarakat terdapat program pengembangan sarana prasarana UMKM, pelatihan pengelolaan BUM Desa. Pada bidang penanggulangan Bencana, darurat dan mendesak terdapat program penanganan keadaan mendesak yaitu berupa pembagian bantuan sosial untuk warga desa Binusan dengan jumlah 200 KK. Dari program-program diatas Sebagian besar telah merupakan program yang terdapat pada Indeks Desa Membangun, walaupun masih terdapat beberapa program yang belum dapat terlaksana yaitu dikarenakan pihak desa tidak memiliki wewenang atas program aitu dan juga tidak cukupnya anggaran yang ada untuk melaksanakan program tersebut sehingga hanya program-program diatas yang dapat dilaksanakan.
	Bidang Pembangunan Desa		akses ke poskesdes, polindes atau posyandu			
	1.836.053.791		Tingkat aktivitas posyandu			
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		tingkat Kepesertaan BPJS			
	605.807.294		Akses Pendidikan Dasar SD/MI < 3 KM			
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		Akses Pendidikan SMP/MTs < 6 KM			
	13.879.000		Akses Pendidikan SMA/SMK/MA < 6 KM	0.20		
	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak		Kegiatan PAUD			

Tahun	APB Des	Capaian IDM	Indeks Desa Membangun	Rekomendasi		Alasan belum terlaksana
				Super Prioritas (0,00% - 0,50%)	Prioritas (0,50% - 0,75%)	
	650.988.000		Kegiatan PKBM/Paket A-B-C	0.20		
			Kegiatan Kursus	0.20		
			Taman Bacaan Masyarakat atau Perpustakaan Desa			
			Kebiasaan Gotong Royong			
			Keterbukaan Ruang Publik			
			Terdapat Kelompok Olahraga			
			Keragaman Suku/Etnis di Desa			
			Bahasa Sehari-hari Warga Desa			
			Agama Mayoritas Warga Desa			
			Tersedianya Sarana Pos Kamling di Desa			
			Partisipasi Warga Siskamling			
			Kejadian Perkelahian Massal di desa			
			Terdapat Akses ke Sekolah Luar Biasa			

Tahun	APB Des	Capaian IDM	Indeks Desa Membangun	Rekomendasi		Alasan belum terlaksana
				Super Prioritas (0,00% - 0,50%)	Prioritas (0,50% - 0,75%)	
			Terdapat Penyandang Kesejahteraan Sosial (Anjal dan Pengemis)			
			Mayoritas Warga Memiliki Sumber Air layak Minum			
			Akses Warga Memiliki Air Mandi dan Mencuci			
			Mayoritas Warga Memiliki Jamban			
			Terdapat Tempat Pembuangan Sampah			
			Jumlah Keluarga yang telah memiliki aliran listrik			
			Warga Memiliki Telepon seluler dan Sinyal Kuat			
			Akses Internet di Kantor Desa			
			Terdapat Akses Internet untuk Warga			
			Indeks Ketahanan Ekonomi			
			Terdapat Lebih dari Satu Jenis Kegiatan Ekonomi Penduduk			

Tahun	APB Des	Capaian IDM	Indeks Desa Membangun	Rekomendasi		Alasan belum terlaksana
				Super Prioritas (0,00% - 0,50%)	Prioritas (0,50% - 0,75%)	
			Akses penduduk ke pusat perdagangan (pertokoan, pasar permanen)			
			Terdapat pasar desa			
			Terdapat Sektor Perdagangan (warung, Minimarket)			
			Terdapat kantor pos dan jasa logistik		0.60	
			Tersedianya lembaga pebankan umum dan BPR		0.60	
			Akses penduduk ke kredit	0.40		
			Tersedianya lembaga ekonomi rakyat (koperasi)/bumdes		0.60	
			Terdapat usaha kedai makanan, restoran, hotel dan penginapan		0.60	
			Terdapat moda (angkutan umum, trayek reguler dan jam operasi)		0.60	

Tahun	APB Des	Capaian IDM	Indeks Desa Membangun	Rekomendasi		Alasan belum terlaksana
				Super Prioritas (0,00% - 0,50%)	Prioritas (0,50% - 0,75%)	
			Jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih			
			Kualitas jalan desa			
			Indeks Ketahanan Lingkungan			
			Pencemaran air, tanah, dan udara			
	Total APB Des		Kejadian bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan)			
	4.209.769.206		Upaya/ tindakan terhadap potensi bencana alam	0.00		

Tahun	APB Des	Capaian IDM	Indeks Desa Membangun	Rekomendasi		Alasan belum terlaksana
				Super Prioritas (0,00% - 0,50%)	Prioritas (0,50% - 0,75%)	
			Indeks Ketahanan Sosial			
2022	Bidang Pemerintah Desa	0.7770 (Maju)	Jarak ke sarana kesehatan terdekat			Pada tahun 2022 dapat dilihat anggaran yang diterima Desa Binusan mengalami penurunan akan tetapi capaian pada IDM mengalami kenaikan, hal ini dikarenakan adanya covid sehingga anggaran yang diterima mengalami penurunan yang sangat-sangat signifikan. Maka dari itu, pemerintah Desa

Tahun	APB Des	Capaian IDM	Indeks Desa Membangun	Rekomendasi		Alasan belum terlaksana
				Super Prioritas (0,00% - 0,50%)	Prioritas (0,50% -0,75%)	
	1.024.981.514		ketersediaan tenaga kesehatan (Bidan, Dokter dan Nakes			<p>Binusan hanya membuat beberapa program yang betul-betul dibutuhkan dan program-program rutin tahunan Desa yaitu seperti pada bidang penyelenggaraan pemerintah Desa seperti gaji kepala desa dan perangkat desa, jaminan sosial kepala desa dan perangkat desa, penyediaan operasional pemerintah desa, tunjangan BPD, penyediaan operasional BPD, intensif RT/RW, penyediaan sarana (asset tetap) perkantoran Desa. Pada bidang penyelenggaraan pembangunan Desa Penyelenggaraan PAUD (Honor, pakaian), dukungan penyelenggaraan PAUD, penyelenggaraan posyandu, pelatihan bidang Kesehatan, penyelenggaraan desa siaga Kesehatan, pembangunan jalan desa, pembangunan jalan desa (gorong, selokan) dan penyelenggaraan informasi publik desa. Pada bidang pembinaan kemasyarakatan seperti program-program yang ada padatahun 2021 akan tetapi setiap program mengalami penurunan anggaran. Pada bidang pemberdayaan masyarakat juga sama seperti pada tahun 2021 dan pada bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak pemerintah desa melakukan penanganan keadaan mendesak memberikan bantuan sosial kepada warga dengan jumlah 150 KK. Alasan skor IDM bisa meningkat tetapi anggaran menurun hal ini dikarenakan pada tahun sebelumnya setiap pembangunan telah dilakukan secara bertahap sehingga perkembangan desa dapat maju setiap tahunnya.</p>
	Bidang Pembangunan Desa		akses ke poskesdes, polindes atau posyandu			
	536.326.195		Tingkat aktivitas posyandu			
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		tingkat Kepesertaan BPJS			
	175.928.000		Akses Pendidikan Dasar SD/MI < 3 KM			
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		Akses Pendidikan SMP/MTs < 6 KM			
	200.000.000		Akses Pendidikan SMA/SMK/MA < 6 KM	0.20		
	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak		Kegiatan PAUD			

Tahun	APB Des	Capaian IDM	Indeks Desa Membangun	Rekomendasi		Alasan belum terlaksana
				Super Prioritas (0,00% - 0,50%)	Prioritas (0,50% -0,75%)	
	594.000.000		Kegiatan PKBM/Paket A-B-C	0.20		
			Kegiatan Kursus	0.20		
			Taman Bacaan Masyarakat atau Perpustakaan Desa			
			Kebiasaan Gotong Royong			
			Keterbukaan Ruang Publik			
			Terdapat Kelompok Olahraga			
			Keragaman Suku/Etnis di Desa			
			Bahasa Sehari-hari Warga Desa			
			Agama Mayoritas Warga Desa			
			Tersedianya Sarana Pos Kamling di Desa			
			Partisipasi Warga Siskamling			
			Kejadian Perkelahian Massal di desa			
			Terdapat Akses ke Sekolah Luar Biasa			

Tahun	APB Des	Capaian IDM	Indeks Desa Membangun	Rekomendasi		Alasan belum terlaksana
				Super Prioritas (0,00% - 0,50%)	Prioritas (0,50% -0,75%)	
			Terdapat Penyandang Kesejahteraan Sosial (Anjal dan Pengemis)			
			Mayoritas Warga Memiliki Sumber Air layak Minum			
			Akses Warga Memiliki Air Mandi dan Mencuci			
			Mayoritas Warga Memiliki Jamban			
			Terdapat Tempat Pembuangan Sampah			
			Jumlah Keluarga yang telah memiliki aliran listrik			
			Warga Memiliki Telepon seluler dan Sinyal Kuat			
			Akses Internet di Kantor Desa			
			Terdapat Akses Internet untuk Warga			
			Indeks Ketahanan Ekonomi			
			Terdapat Lebih dari Satu Jenis Kegiatan Ekonomi Penduduk			

Tahun	APB Des	Capaian IDM	Indeks Desa Membangun	Rekomendasi		Alasan belum terlaksana
				Super Prioritas (0,00% - 0,50%)	Prioritas (0,50% -0,75%)	
			Akses penduduk ke pusat perdagangan (pertokoan, pasar permanen)			
			Terdapat pasar desa			
			Terdapat Sektor Perdagangan (warung, Minimarket)			
			Terdapat kantor pos dan jasa logistik		0.60	
			Tersedianya lembaga pebankan umum dan BPR		0.60	
			Akses penduduk ke kredit	0.40		
			Tersedianya lembaga ekonomi rakyat (koperasi)/bumdes		0.60	
			Terdapat usaha kedai makanan, restoran, hotel dan penginapan		0.60	
			Terdapat moda (angkutan umum, trayek reguler dan jam operasi)		0.60	

Tahun	APB Des	Capaian IDM	Indeks Desa Membangun	Rekomendasi		Alasan belum terlaksana
				Super Prioritas (0,00% - 0,50%)	Prioritas (0,50% -0,75%)	
			Jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih			
			Kualitas jalan desa			
			Indeks Ketahanan Lingkungan			
			Pencemaran air, tanah, dan udara			
	Total APB Des		Kejadian bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan)			
	2.531.235.709		Upaya/ tindakan terhadap potensi bencana alam	0.00		

4.5. Pembahasan

Indeks Desa Membangun menunjukkan data rekomendasi pembangunan desa dalam kurun waktu satu tahun. Data rekomendasi ini menjadi acuan pemerintah desa dalam melaksanakan program-program pembangunan desa yang menjadi perencanaan dalam APBDes dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Indeks Desa Membangun terdiri atas Indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi/lingkungan. Rekomendasi yang dimasukkan pemerintah desa dalam menyusun APBDes dapat mempengaruhi capaian IDM bagi Pemerintah Desa untuk jangka waktu satu tahun.

Pemerintah desa telah melaksanakan perencanaan pembangunan desa pada musyawarah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Binusan bersama dengan pihak-pihak terkait dengan Desa dan kemudian disusun ke dalam APBDes berdasarkan Indeks Desa Membangun dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Di Desa Binusan. Seperti yang telah disampaikan oleh informan bahwa APBDes Desa Binusan telah ditujukan dan sesuai dengan indeks desa membangun. Pemerintah Desa Binusan juga memiliki program-program berkaitan yang diprioritaskan seperti pada aspek Kesehatan yaitu salah satunya pada stunting dan aspek Pendidikan. Selain itu juga kegiatan olahraga untuk menunjang kegiatan sosial masyarakat desa.

Pada bidang pelaksanaan pembangunan desa Binusan berdasarkan rekomendasi indeks desa membangun memprioritaskan program Kesehatan,

Pendidikan. Program-program ini yang termasuk kedalam indeks ketahanan sosial. Program Kesehatan yang berjalan dengan semestinya, dari anggaran fasilitas sarana dan prasarananya serta obat-obatan demi terlaksananya dengan lancar program ini. Pemerintah desa juga bekerja sama dengan pihak PUSKESMAS desa terkait dengan kegiatan program pelayanan Kesehatan dan penanganan masalah Kesehatan pada masyarakat desa. Pemerintah desa dengan cepat menangani masalah Kesehatan terkhusus pada anak-anak. Terdapat juga bantuan asupan makanan-makanan bergizi untuk anak, ibu hamil dan melahirkan serta cek kesehatan dan obat-obatan yang diberikan secara gratis untuk masyarakat desa yang dibantu oleh RT.

Program pendidikan formal yang dilakukan pembangunan sekolah telah terlaksana oleh pemerintah desa yang membangun tiga sekolah berupa PAUD dan TK beserta fasilitas dan juga honor tenaga pendidiknya. Selain program kesehatan dan Pendidikan, ada juga program untuk pembangunan prasarana pariwisata milik Desa Binusan. Program kegiatan olahraga yang sedang berjalan yaitu sepak bola, Bola Voli, Bulu Tangkis dan Sanggar Tari. Kegiatan olahraga ini diikuti oleh masyarakat desa dan dibawa naungan oleh pemerintah desa, karang taruna dan dibantu oleh BUMDES. Dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini akan menambah rasa solidaritas sosial masyarakat Desa Binusan serta membantu pemerintah desa dalam rangka mendukung terlaksannya kegiatan-kegiatan sosial desa.

Selanjutnya program yang telah terlaksana di Desa Binusan sesuai dengan rekomendasi IDM adalah seperti yang disampaikan oleh informan yaitu di Desa Binusan sudah terdapat akses kredit yang diakses melalui bank umum untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat Desa Binusan.

Dalam melaksanakan setiap program-program yang telah dilaksanakan tidak terlepas juga dari adanya kendala yang menghambat kegiatan pembangunan desa yang telah direncanakan. Kendala-kendala yang terjadi mengakibatkan pelaksanaan pembangunan pemerintah desa tidak dapat terlaksana dengan optimal dan semestinya. Kendala pertama pada bidang kesehatan adalah penanganan masalah kesehatan setempat terjadi keterlambatan penanganan dikarenakan munculnya bencana wabah Covid-19 yang membuat semua kegiatan harus diminimalkan.

Selanjutnya kendala yang terjadi pada hasil rekomendasi IDM pada aspek ekonomi yaitu yang pertama pada akses penduduk ke pertokoan, pasar permanen dan pasar desa, belum bisa terlaksana karena anggaran yang tidak memungkinkan untuk ini dan juga dikarenakan luas wilayah Desa Binusan yang sangat luas sehingga, untuk Kawasan perbelanjaan bagi masyarakat ada yang berada dekat dengan perbelanjaan dan ada yang jauh maka masih terdapat masyarakat yang kesulitan untuk menjangkaunya.

Rekomendasi yang juga belum terlaksana oleh pemerintah Desa Binusan adalah dimensi akses distribusi, akses kredit, Lembaga ekonomi dan keterbukaan wilayah. Empat dimensi ini masuk ke dalam indeks ketahanan ekonomi IDM yang

masih belum ada di Desa Binusan dikarenakan pemerintah desa tidak dapat melaksanakannya sendiri, perlu adanya bantuan dan kerja sama dengan pihak terkait untuk penerapan rekomendasi tersebut. Seperti Lembaga ekonomi diperlukannya kerja sama dengan masyarakat dan dana yang memadai agar dapat berjalan, kemudian akses distribusi dan keterbukaan wilayah perlunya bantuan dari kabupaten untuk penerapannya.

Berdasarkan hasil penyampaian informan dan dari data-data yang ada bahwa peran anggaran pendapatan dan belanja desa dalam mendukung capaian indeks desa membangun di Desa Binusan, bahwa pelaksanaan program-program serta kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan rekomendasi indeks desa membangun mencakup aspek sosial, ekonomi dan ekologi/lingkungan yang saling berhubungan. Program-program tersebut telah diprioritaskan di dalam APBDes untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan berbasis IDM desa. Namun masih terdapat dalam pelaksanaannya yang belum secara optimal terlengkas dan terdapat pula rekomendasi yang belum dapat terlaksana oleh Pemerintah Desa karena kurangnya anggaran, butuh koordinasi dan kerja sama terlebih dahulu untuk pelaksanaannya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka kesimpulan sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja desa terhadap capaian Indeks Desa Membangun pemerintah Desa Binusan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan hasil rekomendasi indeks desa membangun pada aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Hal ini dikarenakan adanya kendala berupa luasnya wilayah Desa Binusan dengan anggaran yang ada tidak dapat memenuhi kebutuhan pemerataan pembangunan yang dilakukan di desa dan perlu dibantu oleh dinas terkait.
2. Berdasarkan pelaksanaan program-program pembangunan, program yang sudah berjalan sesuai indeks desa membangun pada dimensi kesehatan, Pendidikan dan modal sosial dalam indeks ketahanan sosial telah terjadi peningkatan dan berjalan secara bertahap dan aktif. Selain itu program yang telah terlaksana sudah terdapat akses kredit yang diakses melalui bank umum untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat Desa Binusan.
3. Rekomendasi yang belum terprogramkan dan terlaksana mengenai capaian indeks desa membangun adalah pasar permanen masih belum bisa terlaksana karena luas wilayah yang dimiliki Desa Binusan sehingga pembangunan tidak dapat merata dengan maksimal. Sesuai dengan indeks desa membangun yang belum ada di Desa Binusan adalah akses distribusi

dan keterbukaan wilayah dikarenakan harus dilakukan oleh pihak terkait untuk membantu agar dapat terlaksananya pembangunan. Akan tetapi masih terdapat beberapa rekomendasi yang menjadi super prioritas pada dimensi Pendidikan yaitu akses Pendidikan SMA/SMK/MA < 6 km, kegiatan PKBM/Paket A-B-C.

4. Adapun juga kegiatan perekonomian yang belum dapat terlaksana dan difasilitasi oleh desa sehingga dapat dikatakan bahwa pada aspek perekonomian Desa Binusan masih memerlukan perhatian yang lebih yaitu terkait BUMDES yang belum dapat terlaksana dikarenakan kurangnya anggaran yang ada untuk mendanai setiap kebutuhan dari BUMDES. Oleh karena itu diperlukan upaya desa dalam mengupayakannya agar dapat menambah PAD desa.
5. Pada aspek lingkungan atau indeks komposit lingkungan dalam rekomendasi indeks desa membangun, capain pada dimensi rawan dan tanggap bencana di Desa Binusan telah dilakukan, pemerintah juga telah berupaya dalam mengatasi potensi bencana yang terjadi di Desa Binusan, dalam hal ini juga telah tercatat di dalam data hasil rekomendasi indeks desa membangun bahwa skor indeks komposit lingkungan di Desa Binusan sebesar 1.00 yang menyatakan terpenuhi.

5.2 Saran

Saran yang diberikan oleh penulis untuk Desa Binusan, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Binusan dapat mengoptimalkan penyusunan anggaran yang diterima Desa, sehingga setiap anggaran yang ada dapat terwujud secara optimal. Dengan demikian, setiap program pembangunan desa yang ada dapat terlaksana secara optimal.
2. Pemerintah Desa Binusan dapat lebih memperhatikan indikator yang terdapat dalam Indeks Desa Membangun yang merupakan rekomendasi prioritas dan super prioritas. Terutama yang terdapat pada indeks komposit ekonomi, karena indeks komposit ekonomi ini selalu memiliki persentase terendah setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggriany, P. (2021). *Village Development Index Of Kuala Tolak Village, Matan Hilir Utara District Ketapang Reggency*. Jakarta.
- Arina, Masinambow, & Walewangko. (2021). *Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Minahasa Tenggara*. In *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah* (Vol. 22).
- Creswell. (2015). *Riset Perencanaan, dan evaluasi riset kualitatif dan kuantitatif Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fadhallah. (2021). *Wawancara* (1st ed.). Jakarta Timur : UNJ PRESS.
- Faridah. (2015). *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Faridah Bambang Suryono Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*.
- Fauziah. (2021). *Indeks Desa Membangun Desa Kendawangan Kanan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang*.
- Hajratul, Pratiwi, Yuniarti.(2021). *Analisis Indeks Desa Membangun Desa Jeruju Besar*.
- Hamidi, Setijonegoro, Fujitriartanto, Sa'id, & Harioso. (2015). *Indeks Desa Membangun*. Jakarta Selatan.
- Hermansyah, syapsan, & ekwarso. (2022). *Analisis Pemanfaatan Pendapatan Desa Terhadap Capaian Indeks Desa Membangun (IDM) Di Kabupaten Kuantan Singingi*. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*.
- Lembaran Negara. (2014). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta.
- . (2016). *Permendesa Nomor 2 tentang Indeks Desa Membangun*. Jakarta
- . (2018). *Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta. Retrieved from www.peraturan.go.id
- . (2019). *Peraturan Desa Binusan (No.09 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM- DESA) Tahun 2019-2025)* . Nunukan : Desa Binusan.
- . (2022). *Indeks Desa Membangun* . Retrieved March 12, 2023, from Kementerian Desa website: <https://idm.kemendesa.go.id/rekomendasi>
- Martiasuti, & Nugroho. (2021). *Analisis Kinerja Keuangan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya*. 6(2). Retrieved from www.jim.unsyiah.ac.id/JFP
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. surakarta

- Nyoman Astika, & Subawa. (2021). *Evaluasi Pembangunan Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun*. Nyoman Sri Subawa), 5. Retrieved from <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah>
- Orangbio. (2017). *Analisis Perencanaan dan Pertanggungjawaban APBDES Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa*. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 1–8.
- Purnawati. (2020). *Peranan Pemerintah Desa dalam Menangani Konflik Peternakan Ayam Broiler di Desa Pucanglaban Kabupaten Tulungagung*. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 229–243. <https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.117>
- Satori, & Komriah. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (5th ed.). Bandung : Alfabeta.
- Setyowati, E. (2019). *Tata Kelola Pemerintahan Desa Pada Perbedaan Indeks Desa Membangun (Idm): Studi Tiga Desa Di Kabupaten Malang*. In *JISPO* (Vol. 9).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif)* (2nd ed.; S. Y. Suryandari, Ed.). Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif, dan konstruktif)* (5th ed.; S. Y. Suryandari, Ed.). Bandung : ALFABETA.
- Sulaiman. (2018). *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa*. Jatinangor: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Tambunan, Sihombing, & Harahap. (2020). *Peranan Dana Desa dalam Pengembangan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara*. *PERSPEKTIF*, 9(2), 439–446. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i2.3942>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara

Informan : Kepala Desa
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Metode Wawancara : Terstruktur
 Hari/Tanggal : Senin, 5 Juni 2023
 Lokasi : Kantor Desa Binusan

Pertanyaan Tentang APBDes
Bagaimana proses awal dalam penyusunan APBDes di Desa Binusan?
Siapa saja yang berperan dalam proses penyusunan APBDes di Desa Binusan?
Siapa saja yang terlibat dalam pertanggungjawaban APBDes?
Bagaimana mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDes?
Bagaimana proses pengelolaan APBDes di Desa ini?
Apakah ada masalah yang ditemui pada saat penyusunan anggaran?
Mengapa anggaran pendapatan dan belanja desa di desa Binusan dari tahun 2020-2022 selalu mengalami penurunan?
Apa saja program yang telah dilakukan dalam penyusunan APBDes dalam mencapai setiap indikator yang ada pada IDM?
Adakah tahapan dalam penetapan APBDes terkait dengan pengelolaan keuangan desa dalam hal pembangunan desa?
Pertanyaan Tentang Indeks Desa Membangun
Apakah di desa Binusan telah tersedia tenaga kesehatan seperti bidan, dokter atau nakes di puskesmas terdekat?
Berapa lama waktu yang di butuhkan untuk akses menuju rumah sakit atau puskesmas?
Seperti apa tingkat kepesertaan BPJS di Desa Binusan untuk warga desa?
Bagaimana dan berapa lama akses pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Desa Binusan?
Apakah pihak desa telah melakukan Alokasi bangunan terhadap sekolah-sekolah yang terdapat di Desa Binusan?
Apakah terdapat kegiatan PKBM/paket A-B-C dan kegiatan kursus di Desa Binusan?
Apakah di desa Binusan terdapat kegiatan gotong royong bagi masyarakat desa Binusan?
Apakah di desa Binusan terdapat keterbukaan ruang publik untuk warga desa?
Apakah terdapat pusat perdagangan seperti akses penduduk ke pertokoan, pasar permanen dan pasar desa untuk masyarakat desa Binusan? jika belum kenapa?
Apakah di Desa Binusan memiliki akses distribusi logistik seperti adanya kantor pos dan jasa logistik ? jika belum kenapa?
Apakah di Desa Binusan terdapat akses kredit seperti tersediannya lembaga perbankan umum, akses penduduk ke kredit dan Lembaga ekonomi rakyat (koperasi)/Bumdes? jika belum kenapa?
Apakah di Desa Binusan terdapat keterbukaan wilayah seperti angkutan umum, jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat dan kualitas jalan desa? jika belum kenapa?

Informan : Sekertaris
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Metode Wawancara : Terstruktur
 Hari/Tanggal : Senin, 5 Juni 2023
 Lokasi : Kantor Desa Binusan

<p>Apa saja aturan-aturan dalam mengelola keuangan desa?</p>
<p>Dengan adanya kebijakan tersebut, apakah sudah berjalan dengan baik?</p>
<p>Apakah struktur birokrasi berpengaruh dalam mengelola keuangan desa?</p>
<p>Bagaimana mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDes?</p>
<p>Apakah pihak desa telah melakukan Alokasi bangunan terhadap sekolah-sekolah yang terdapat di Desa Binusan?</p>

Lampiran 2. Kantor Desa Binusan




Lampiran 3. Wawancara dengan Kepala Desa



Lampiran 4. Wawancara dengan Sekretaris Desa



Lampiran 5. Surat Penelitian


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**
 Alamat : Jalan Tanah Grogot No. 01 Gunung Kelua Samarinda Kode Pos 75119
 Telepon : (0541) 738913-738915-79816 Fax : (0541) 738913-738916
 Laman : <https://feb.unmul.ac.id>

Nomor : 2317/UN17.1/PL/2022 Samarinda, 07 Desember 2022
 Lampiran :
 Perihal : Penyusunan Skripsi Mahasiswa

Kepada Yth. : Kepala Kantor Desa Binusan
 Di
 Kabupaten Nunukan

Sehubungan dengan penyusunan skripsi yang merupakan tugas akhir bagi mahasiswa Program Sarjana (S1) maka kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan menerima mahasiswa kami untuk melaksanakan penelitian di instansi yang Bapak/Ibu pimpin dengan judul :


**Peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dalam Mendukung Capaian Indeks Desa
Membangun Desa Binusan Kabupaten Nunukan**

Adapun mahasiswa yang dimaksud adalah :

Nama	: Nurul Safaria Dahlan
NIM	: 1901036172
Tempat/Tanggal lahir	: Nunukan, 20 Mei 2000
Jurusan	: Akuntansi
Program Studi	: S1 Akuntansi
Semester	: 7 (Tujuh)
Alamat	: Jalan Ujang Dewa, Rt 003, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara
No. Telepon	: 082255168252


Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik



F. Defung, MA., PhD
 NIP. 19700329 199903 2 001
 Dokumen ini disahkan menggunakan tanda tangan elektronik
 Telah diverifikasi pada <http://sivd.feb.unmul.ac.id>

Lampiran 6. Balasan Surat Penelitian



PEMERINTAH DESA BINUSAN
KECAMATAN NUNUKAN
KABUPATEN NUNUKAN
Jl. Aji Muda Rt. 01 Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kode Pos 77482

Nunukan, 05 Juni 2023


Nomor : 005/31/DB/VI/2023
Lampiran : -
Perihal : Penyusunan Skripsi Mahasiswa
Kepada : Dekan Bidang Akademik
Universitas Mulawarman
Di-
Samarinda

Berdasarkan Surat dari Dekan Bidang Akademik Universitas Mulawarman Nomor : 2317/UN17.1/PL/2022 Tanggal : 07 Desember 2022 Perihal ; Penyusunan Skripsi Mahasiswa, dengan hal tersebut diatas kami menyampaikan bahwa :

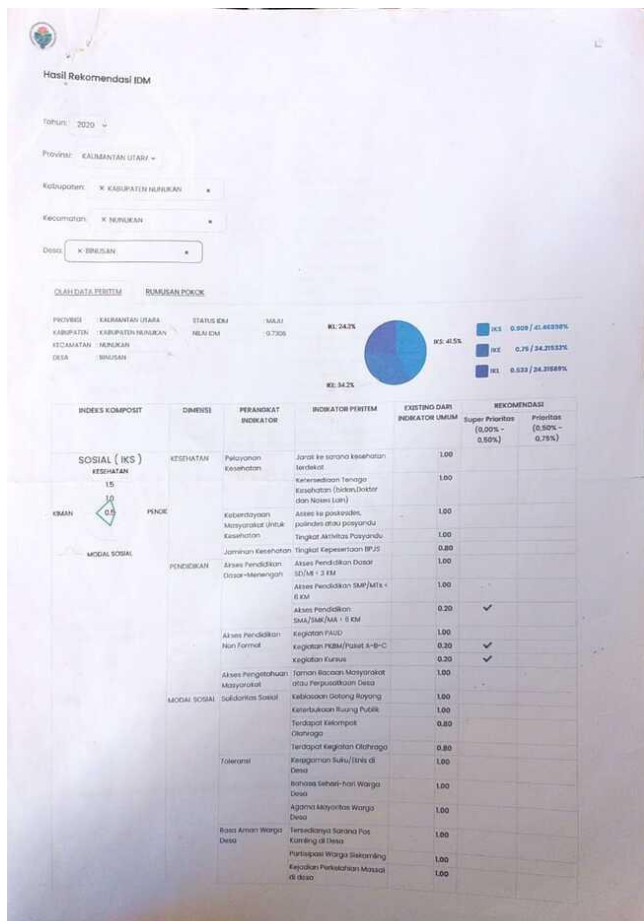
Nama : Nurul Safaria Dahlan
NIM : 1901036172
Jurusan : Akuntansi
Program : S1 Akuntansi

Telah melaksanakan Penelitian dan Permintaan Data dengan judul Skripsi : Peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dalam Mendukung Capaian Indeks Desa Membangun Desa Binusan Kabupaten Nunukan di Desa Binusan Kabupaten Nunukan.

Demikian yang dapat kami sampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

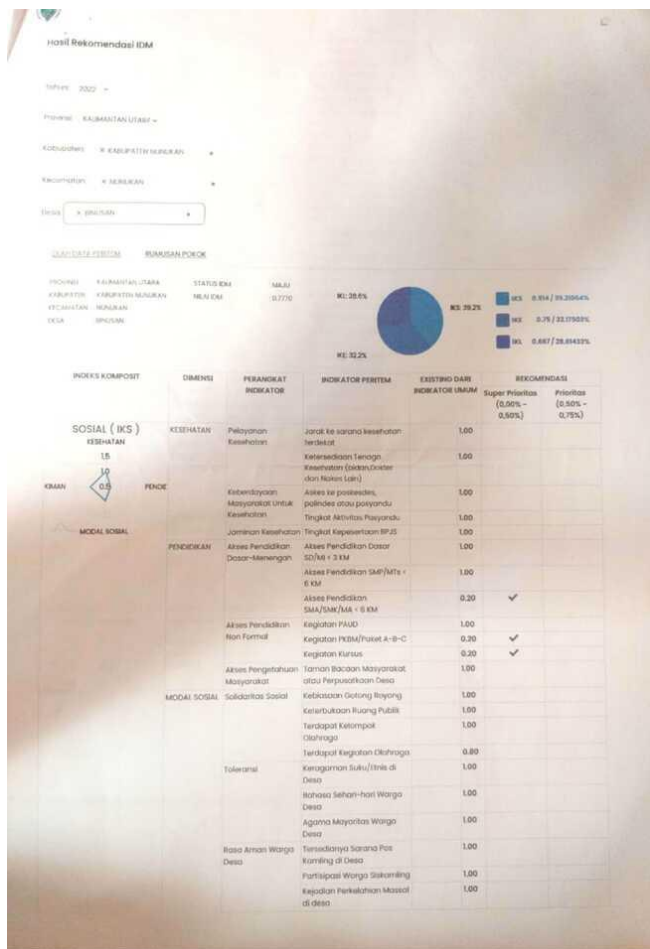
Kepala Desa Binusan,

RUDINARTONO, S.Sos

Lampiran 7. Indeks Desa Membangun 2020



KATEGORI	INDIKATOR	DESKRIPSI	SKOR	STATUS
EKONOMI (IKE)	KERAGAMAN PRODUKSI	Ases Ke Berah dan Loyal Minum	1,00	
		Ases Ke Fasilitas Sanitasi	1,00	
		Ases Ke Fasilitas Listrik	1,00	
		Ases Fasilitas Informasi dan Komunikasi	1,00	
		Keragaman Produk	1,00	
		Ases Distribusi Logistik	0,60	✓
		Ases Terhadap Lembaga Keuangan dan Perbankan	0,60	✓
		Lembaga Ekonomi	0,60	✓
		Keterbukaan Wilayah	0,60	✓
		Potensi Rawan Bencana	0,80	
LINGKUNGAN (IKL)	KUALITAS LINGKUNGAN	Kualitas Lingkungan	1,00	
		Pencemaran Air, Tanah dan Udara	0,80	
BENCANA	POTENSI DAN TANGGAP BENCANA	Potensi Rawan Bencana	0,80	
		Tanggap Bencana	0,00	✓

Lampiran 9. Indeks Desa Membangun 2022



KATEGORI	INDIKATOR	STATUS	REKOMENDASI
EKONOMI (IKE)	PERAGAMAAN	Akses Air Bersih dan Layak Minum	1,00
	PERAGAMAAN	Akses Warga Memiliki AS Mandi dan Mencuci	1,00
	PERAGAMAAN	Akses ke Fasilitas Kesehatan	1,00
	PERAGAMAAN	Terdapat Tempat Pembuangan Sampah	1,00
	PERAGAMAAN	Akses ke Fasilitas Sains	1,00
	PERAGAMAAN	Akses Fasilitas Informasi dan Komunikasi	1,00
	PERAGAMAAN	Terdapat akses internet untuk warga	1,00
	PERAGAMAAN	Terdapat lebih dari satu Jenis Kegiatan Ekonomi	1,00
	PERAGAMAAN	Produksi Masyarakat Desa	1,00
	PERAGAMAAN	Terdapatnya Pasar Persebaran	1,00
IKM	AKSES DE	Terdapat Sektor Persebaran (kegiatan masyarakat)	0,60
	AKSES DE	Akses Distribusi Logistik	0,60
	AKSES DE	Akses Terhadap lembaga keuangan dan Persebaran	0,60
	AKSES DE	Akses Terhadap ke Kredit	0,40
	LEMBAGA EKONOMI	lembaga Ekonomi	0,60
	LEMBAGA EKONOMI	lembaga Ekonomi (Koperasi)/Bumdes	0,60
	LEMBAGA EKONOMI	Terdapat Usaha Kecil, menengah, menengah besar dan Penghasilan	0,60
	LEMBAGA EKONOMI	Keterbukaan Wilayah	0,60
	LEMBAGA EKONOMI	Jalan yang Dapat Dilalui oleh kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih	0,60
	LEMBAGA EKONOMI	Kualitas Jalan Desa	1,00
LINGKUNGAN (IKL)	KUALITAS LINGKUNGAN	Kualitas Lingkungan	1,00
	POTENSI DAN TANGGAP BENCANA	Potensi Bencana	1,00
	POTENSI DAN TANGGAP BENCANA	Tanggap Bencana	0,50
	POTENSI DAN TANGGAP BENCANA	Uji coba/Indikator terhadap Potensi Bencana Alam	0,50

Lampiran 10. Laporan APB Desa 2020

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BINJISAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Realisasi s.d 31/12/2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa			
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
4.2.1.	Dana Desa	3.703.580.946,00	3.461.729.792,00	241.851.153,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	2.603.371.000,00	2.603.371.000,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.100.209.946,00	858.358.793,00	241.851.153,00
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	339.215,78	(339.215,78)
	JUMLAH PENDAPATAN	3.709.580.946,00	3.468.069.068,78	241.511.877,22
6.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai			
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	340.300.000,00	271.500.000,00	68.800.000,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	62.500.000,00	49.000.000,00	13.500.000,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	189.000.000,00	148.500.000,00	40.500.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.800.000,00	74.000.000,00	14.900.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.339.106.296,00	1.191.247.667,79	187.868.628,21
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	282.311.296,00	288.701.296,00	13.610.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	697.945.000,00	585.690.000,00	112.295.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	20.600.000,00	14.207.000,00	6.393.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	13.100.000,00	8.390.000,00	4.710.000,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	217.000.000,00	169.090.847,00	47.909.163,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada I.	9.200.000,00	7.000.000,00	2.200.000,00
5.3.	Belanja Modal	98.950.000,00	98.178.524,79	771.475,21
5.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat	1.481.667.826,20	1.459.638.826,20	22.029.000,00
5.3.2.	Belanja Modal Kendaraan	72.230.000,00	50.201.000,00	22.029.000,00
5.3.3.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	219.188.000,00	219.188.000,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	906.589.826,20	906.589.826,20	0,00
5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah	72.700.000,00	72.700.000,00	0,00
5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	648.000.000,00	648.000.000,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	648.000.000,00	648.000.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	3.809.074.122,20	3.530.386.493,99	278.687.628,21
	SURPLUS / (DEFISIT)	(99.493.176,20)	(62.317.425,21)	(37.175.890,99)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	99.493.176,20	99.493.176,20	0,00

Printed by Siskeudes 17/02/2021 20:47:12 Halaman 1

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	99.493.176,20	99.493.176,20	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	99.493.176,20	99.493.176,20	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	37.175.890,99	(37.175.890,99)

BINJISAN, 04 Januari 2021
KEPALA DESA
HUDA HARTONO, S.Sos

Printed by Siskeudes 17/02/2021 20:48:56 Halaman 2

Lampiran 11. Laporan APB Desa 2021

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BINUSAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

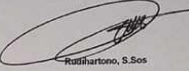
Realisasi s.d 31/12/2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer			
4.2.1.	Dana Desa	4.272.993.616,00	4.167.407.903,00	106.186.613,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	3.284.846.000,00	3.284.846.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.007.747.516,00	902.561.903,00	105.186.613,00
5.	BELANJA	4.272.993.616,00	4.167.407.903,00	106.186.613,00
5.1.	Belanja Pegawai			
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	348.200.000,00	300.075.000,00	48.125.000,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	63.000.000,00	49.500.000,00	13.500.000,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	189.000.000,00	161.775.000,00	27.225.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	98.200.000,00	88.800.000,00	7.400.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Pertengkapan	1.552.944.901,17	1.419.172.388,00	134.772.416,17
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	322.169.419,00	288.551.900,00	43.617.519,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.083.747.680,00	1.015.700.495,00	68.047.185,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	28.327.705,17	19.750.000,00	8.577.705,17
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	35.950.000,00	22.150.000,00	13.800.000,00
5.3.	Belanja Modal	34.950.000,00	34.950.000,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat	1.657.636.405,82	1.657.636.405,82	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	29.616.000,00	29.616.000,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	1.052.019.605,82	1.062.009.606,00	9.989,82
5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	462.720.830,00	462.720.799,00	31,00
5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	52.280.000,00	52.280.000,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	650.988.000,00	650.988.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	4.209.769.206,89	4.026.861.790,00	182.907.416,89
	SURPLUS / (DEFISIT)	62.824.309,01	140.546.113,00	(77.721.803,99)
6.	PEMBAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	37.175.690,99	37.175.690,99	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan			
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	(62.824.309,01)	62.824.309,01	0,00

Printed by Siskrudas 12/11/2021 23:29:29 Halaman 1

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	SISA LEBIH PEMBAYAAAN ANGGARAN	0,00	77.721.803,99	(77.721.803,99)

Nunukan, 12 November 2021
Kepala Desa


Ruslihartono, S.Sos

Printed by Siskrudas 12/11/2021 23:29:29 Halaman 2

Lampiran 12. Laporan APB Desa 2022

Nomor : 2
Tahun : 2022

**PELUBARAN ANGGARAN PENDAKTAN DAN BELAJA DESA
PEREMBAH DESA BUNSON
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT			ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN	ANGGARAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.	PENDAPATAN					
4.1.	Penerimaan Asli Desa				8.550.000,00	
4.1.A.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa				8.550.000,00	
4.1.A.01	Hasil Pungutan Desa				2.444.544.812,00	
4.2.	Pendapatan Transfer				1.439.771.400,00	
4.2.1.	Desa Desa				1.439.771.400,00	
4.2.1.01	Desa Desa				864.770.812,00	
4.2.3.	Akumulasi Desa				564.770.812,00	
4.2.3.01	Akumulasi Desa				2.444.970.812,00	
5.	BELAJA					
5.1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA				1.024.943.516,00	
5.1.01.	Penyenggaraan Belanja Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemeliharaan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)				1.901.337.859,23	ADD
5.1.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1	Org		67.500.000,00	ADD
5.1.01.01.01.	Belanja Pegawai				67.500.000,00	
5.1.01.01.01.01.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa				67.500.000,00	
5.1.01.01.01.01.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa				42.000.000,00	
5.1.01.01.01.01.01.01.	Tunjangan Kepala Desa				25.500.000,00	
5.1.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	6	Or		188.000.000,00	ADD
5.1.01.02.01.	Belanja Pegawai				188.000.000,00	
5.1.01.02.01.01.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa				188.000.000,00	

Halaman: 1

Printed by Software 12/09/2022 04:41:54

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT			ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN	ANGGARAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.	5.1.2.01				126.000.000,00	
1.01.02.	5.1.2.02				63.000.000,00	
1.01.03.	5.1.		7	Orang	12.973.296,00	ADD
1.01.03.	5.1.1.				12.973.296,00	
1.01.03.	5.1.1.1.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			1.853.328,00	
1.01.03.	5.1.1.2.01	Jaminan Kesehatan Kepala Desa			1.119.869,36	ADD, PAD
1.01.03.	5.1.1.2.02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa			1.853.328,00	
1.01.04.	5.2.	Penyediaan Operasional Pemeliharaan Desa (ITK, Honor PKPD dan PPKD, Penyelenggaraan Perkebunan, pakatan)	36	Or	497.24.813,83	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang dan Jasa			497.24.813,83	
1.01.04.	5.2.1.1.	Belanja Barang Penyelenggaraan			26.424.813,83	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Bonds Pos			21.792.887,83	
1.01.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Pengendalian			3.931.516,20	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			384.730.000,00	
1.01.04.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pembanu Tugas Uraic			304.170.000,00	
1.01.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Peltagas			63.000.000,00	
1.01.04.	5.2.2.06	Belanja Jasa Honorarium PKPD dan PPKD			17.000.000,00	
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkebunan			27.800.000,00	
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			24.000.000,00	
1.01.04.	5.2.5.02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih			3.800.000,00	
1.01.06.	5.1.	Penyediaan Tunjangan BPD	5	Or	96.200.000,00	ADD
1.01.06.	5.1.1.	Belanja Pegawai			96.200.000,00	
1.01.06.	5.1.4.	Tunjangan BPD			96.200.000,00	
1.01.06.	5.1.4.02	Tunjangan Kinerja BPD			96.200.000,00	
1.01.06.	5.2.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Penyelenggaraan Perkebunan, Pakatan Senagam, per)	1	Tahun	3.000.000,00	ADD
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang dan Jasa			3.000.000,00	
1.01.06.	5.2.1.1.	Belanja Barang Penyelenggaraan			3.000.000,00	

Halaman: 2

Printed by Software 12/09/2022 04:41:55

KODE REKENING	URUMAN			KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
	1	2	3	VOLUME	SATUAN		
2.02.03	5.2.1.08		Belanja Benda/Umkl/Umbul/Syarak			700.000,00	
2.02.03	5.2.2.		Belanja Jasa Honorarium			13.500.000,00	
2.02.03	5.2.2.01		Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan			3.200.000,00	
2.02.03	5.2.2.04		Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Nasumber			3.500.000,00	
2.02.03	5.2.2.05		Belanja Jasa Honorarium Pelajar			6.000.000,00	
2.02.03	5.2.3.		Belanja Perjalanan Dinas			2.500.000,00	
2.02.03	5.2.3.03		Belanja Kurasi Pakaian			2.500.000,00	DDG
2.02.04			Penyenggaraan Desa Siga Kesehatan	1	Kg	116.218.000,00	
2.02.04	5.2.		Belanja Barang dan Jasa			50.000.000,00	
2.02.04	5.2.1.		Belanja Barang Perminyakan			50.000.000,00	
2.02.04	5.2.1.07		Belanja Bahan Material			50.000.000,00	
2.02.04	5.2.2.		Belanja Jasa Honorarium			60.218.000,00	
2.02.04	5.2.2.01		Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan			60.218.000,00	
02.03.			Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang	1	Tahun	191.871.165,82	
2.03.10.			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pasaran Jalan Desa (konstruksi dan lain-lain)	1	Tahun	95.617.165,82	DDG
2.03.10.	5.3.		Belanja Modal			95.617.165,82	
2.03.10.	5.3.5.		Belanja Modal Jalan/Pasaran Jalan			5.400.000,00	
2.03.10.	5.3.5.01		Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksanaan Kegiatan			27.268.395,82	
2.03.10.	5.3.5.02		Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			9.070.000,00	
2.03.10.	5.3.5.03		Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			53.876.600,00	
2.03.10.	5.3.5.04		Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan			95.944.200,00	DDG
2.03.14.			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pasaran Jalan Desa (konstruksi, perbaikan dll)	1	Tahun	95.944.200,00	
2.03.14.	5.3.		Belanja Modal			95.944.200,00	
2.03.14.	5.3.5.		Belanja Modal Jalan/Pasaran Jalan			95.944.200,00	
2.03.14.	5.3.5.01		Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksanaan Kegiatan			2.700.000,00	
2.03.14.	5.3.5.02		Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			18.600.000,00	

Printed by: Siskovindri 12/04/2022 04:41:00

KODE REKENING	URUMAN			KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
	1	2	3	VOLUME	SATUAN		
2.03.14	5.3.5.03		Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			4.536.000,00	
2.03.14	5.3.5.04		Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan			70.118.200,00	
02.06.			Sub Bidang Pembinaan, Komunikasi dan Informatika			12.500.000,00	DDG
2.06.02.			Penyenggaraan Informasi Publik Desa (Penerbit Balita Dll)	1	Tahun	12.500.000,00	DDG
2.06.02.	5.2.		Belanja Barang dan Jasa			12.500.000,00	
2.06.02.	5.2.1.		Belanja Barang Perumahan			5.000.000,00	
2.06.02.	5.2.1.07		Belanja Bahan Material			5.000.000,00	
2.06.02.	5.2.2.		Belanja Jasa Honorarium			7.500.000,00	
2.06.02.	5.2.2.04		Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Nasumber			7.500.000,00	
03			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			175.938.000,00	
03.02.			Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			47.000.000,00	DDG
3.02.05.			Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan MHR Desa (Dipilih)	1	Tahun	47.000.000,00	DDG
3.02.05.	5.3.		Belanja Modal			47.000.000,00	
3.02.05.	5.3.4.		Belanja Modal Gedung, Bangunan, dan Taman			47.000.000,00	
3.02.05.	5.3.4.01		Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksanaan Kegiatan			2.700.000,00	
3.02.05.	5.3.4.02		Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			6.300.000,00	
3.02.05.	5.3.4.03		Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			35.000.000,00	
03.04.			Sub Bidang Kembangkan Masyarakat			128.938.000,00	
3.04.01.			Pembinaan Lembaga Adat	1	Tahun	62.000.000,00	DDG
3.04.01.	5.2.		Belanja Barang dan Jasa			63.000.000,00	
3.04.01.	5.2.2.		Belanja Jasa Honorarium			63.000.000,00	
3.04.01.	5.2.2.03		Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			63.000.000,00	
3.04.02.			Pembinaan LKMD/LPMD			29.400.000,00	DDG
3.04.02.	5.2.		Belanja Barang dan Jasa			29.400.000,00	
3.04.02.	5.2.2.		Belanja Jasa Honorarium			29.400.000,00	
3.04.02.	5.2.2.03		Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			29.400.000,00	


Printed by: Siskovindri 12/04/2022 04:41:00

KODE REKENING	URAIAN	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	4	5	6	7
3.04.03.	Pembelian PAK			9.500.000,00	DDS
3.04.03. 5.2.	Belanja Barang dan Jasa		Tahun	9.500.000,00	
3.04.03. 5.2.1.	Belanja Barang Perkelengkapan			9.500.000,00	
3.04.03. 5.2.1.07	Belanja Bahan Material			9.500.000,00	DDS
3.04.04.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Komunitas			27.028.000,00	
3.04.04. 5.2.	Belanja Barang dan Jasa		Tahun	27.028.000,00	
3.04.04. 5.2.1.	Belanja Barang Perkelengkapan			8.028.000,00	
3.04.04. 5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Pengiriman			1.100.000,00	
3.04.04. 5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minum)			2.500.000,00	
3.04.04. 5.2.1.07	Belanja Bahan Material			4.528.000,00	
3.04.04. 5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			11.000.000,00	
3.04.04. 5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			3.200.000,00	
3.04.04. 5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Praktisi/Konsultan/Manusaber			7.800.000,00	
3.04.04. 5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			8.000.000,00	
3.04.04. 5.2.3.03	Belanja Kertas/Palihan			8.000.000,00	
04	BIDANG PERBERDAYAAN MASYARAKAT			200.000.000,00	
04.05.	Sub Bidang Kopresi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)			200.000.000,00	DDS
4.05.02.	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi		Tahun	200.000.000,00	
4.05.02. 5.1.	Belanja Modal			200.000.000,00	
4.05.02. 5.1.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			5.400.000,00	
4.05.02. 5.1.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksanaan Kegiatan			86.400.000,00	
4.05.02. 5.1.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Uprah Tenaga Kerja			108.200.000,00	
4.05.02. 5.1.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			94.000.000,00	
05	BIDANG PENGANGGULANSAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			984.000.000,00	
05.01.	Sub Bidang Keadan Mendesak			984.000.000,00	DDS
05.01.06.	Pengangan Keadan Mendesak		Tahun	984.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARANGCUPRAIT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
5.03.00	Belanja Tidak Terutang				
5.03.00. 5.4.	Belanja Tidak Terutang			84.500.000,00	
5.03.00. 5.4.1.	Belanja Tidak Terutang			94.500.000,00	
5.03.00. 5.4.1.01	Belanja Tidak Terutang			94.500.000,00	
	JUMLAH BELANJA			2.811.233.718,82	
	SURPLUS DEFISIT			(77.144.898,82)	
6	PEMBAYAN				
6.1.	Pembiayaan Pembiayaan			27.144.898,82	
6.1.1.	SLPA Tahun Sebelumnya			27.144.898,82	
6.1.1.01	SLPA Tahun Sebelumnya			27.144.898,82	
	PEMBAYAN NETO			27.144.898,82	
	ISIA LEBIH/URANG/PEMBAYAN ANGGARAN			0,00	



Lampiran 13. Lembar Koreksi Seminar


KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS S1
 Alamat: Jalan Muara Kaman, Telpon 0541 738916, Samarinda 75199 Kalimantan Timur


CATATAN KOREKSI / SARAN SEMINAR PROPOSAL
JURUSAN AKUNTANSI

Nama Mahasiswa : Nurul Safaria Dahlan
 NIM : 1901036172
 Program Studi : S1-Akuntansi
 Judul Skripsi : Peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Mendukung Capaian Indeks Desa Membangun Desa Binusan Kabupaten Nunukan
 Dosen Pembimbing : Dr. Wulan Iyhyig Ratna Sari S.E., M. Si., CSP

NO.	HALAMAN	BAB	ISI KOREKSI ATAU SARAN
1.			Perbaiki sesuai saran dari penguji - hal 27 - informan dijelaskan peraya






Samarinda, 03 April 2023
 Disetujui Oleh,
 Pembimbing

• Setiap blanko yang berisi Koreksi / saran harap diphoto
 Copy masing-masing 2 (dua) rangkap


Dr. Wulan Iyhyig Ratna Sari S.E., M. Si., CSP
 NIP. 19770328 200312 2 001



PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Narasumber : Pembimbing dan Penguji.

No. Urut	Tanggal	Bab/Hal/dll (yang dikonsultasikan)	Paraf Narasumber
5	03/08/2023	Bab IV : Hasil Penelitian Bab V : Kesimpulan dan Daftar pustaka	
6	09/09/2023	Bab IV: Penulisan dll	
7	02/10/2023	Abstrak	
8	04/10/2023	Perbaiki Fullpaper Untuk mengikuti seminar MICEB, Perbaiki Abstrak Untuk MICEB	
9	08/10/2023	Abstrak, Perbaiki Penulisan, dan Referensi	

PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Narasumber : Pembimbing dan Penguji.

No. Urut	Tanggal	Bab/Hal/dll (yang dikonsultasikan)	Paraf Narasumber
10.	18/10/2023	Bab IV = Hasil penelitian Hal 63 Abstrak	
11	19/10/2023	- Abstrak - Bab IV = Hasil penelitian Hal. 63 Hal 67, 86 Penulisan, Daftar isi	

Lampiran 14. Bebas Plagiasi

Nurul Safaria Dahlan - 1901036172 Peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Mendukung Capaian Indeks Desa Membangun Desa Binusan Kabupaten Nunukan.

ORIGINALITY REPORT

20%	19%	9%	7%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uhn.ac.id Internet Source	1%
2	text-id.123dok.com Internet Source	1%
3	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	1%
4	repository.ut.ac.id Internet Source	1%
5	www.unars.ac.id Internet Source	1%
6	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	1%
7	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
8	dinaspmd.kalselprov.go.id Internet Source	1%